

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

DINAS PERKEBUNAN
TAHUN 2025 ~ 2029

PEMERINTAH DAERAH
KUTAI KARTANEGARA



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami panjatkan ke Hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas terselesaikannya penyusunan “Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029”. Dengan tersusunnya Rencana Strategis yang memuat kebijaksanaan makro diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan rencana program dan kegiatan 5 (lima) tahun kedepan yang tentunya akan disesuaikan dengan kondisi yang ada pada saat ini.

Rencana Strategis ini secara garis besar memuat tentang Isu-Isu Strategis, Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program, Kegiatan, dan Subkegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, serta Pendanaan Indikatif pada Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029. Dokumen ini akan menjadi pedoman pelaksanaan kebijakan di sub sektor perkebunan dan merupakan pedoman bagi penyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Perkebunan setiap tahun.

Selanjutnya terima kasih yang tak terhingga kami ucapkan kepada semua pihak yang telah memberikan masukan, koreksi, kepercayaan dan kesempatan kepada kami dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029. Semoga Rencana Strategis ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua, khususnya bagi Pembangunan Sub Sektor Perkebunan di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Tenggarong, 12 Januari 2026



**TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PERKEBUNAN TAHUN 2025 -2029**

- I. Penanggung Jawab : Kepala Dinas Perkebunan.
- II. Ketua : Sekretaris Dinas Perkebunan.
- III. Anggota :
 - 1. Kepala Bidang Produksi Dinas Perkebunan.
 - 2. Kepala Bidang Pengembangan dan Perbenihan Dinas Perkebunan.
 - 3. Kepala Bidang Perlindungan Dinas Perkebunan.
 - 4. Kepala Bidang Usaha dan Penyuluhan Dinas Perkebunan.
 - 5. Kepala Bidang Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
 - 6. Kepala Sub Bagian Umum dan Ketatalaksanaan Dinas Perkebunan.
 - 7. Nor Aida.SP.,MP / NIP 197101021994022001 (Pengawas Alat dan Mesin Pertanian Ahli Muda) Dinas Perkebunan.
 - 8. Sukatmi. SP / NIP 197212162007012008 (Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi) Dinas Perkebunan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
TIM PENYUSUN RENSTRA	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan.....	2
1.3. Maksud Dan Tujuan	4
1.4. Sistematika Penulisan	5
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU	
ISU STRATEGIS DINAS PERKEBUNAN	7
2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah.....	7
2.1.1 Tugas, Fungsi Dan Struktur Perangkat Daerah.....	7
2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah.....	12
2.1.2.1 Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Perangkat Daerah.....	12
2.1.2.2 Sarana dan Prasarana	13
2.1.2.3. Unit Usaha Dinas Perkebunan	15
2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	16
2.1.3.1. Capaian Indikator Kinerja	16
2.1.3.2. Realisasi Anggaran	25
2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan	27
2.1.5. Mitra Perangkat Daerah	27
2.1.6. Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah.....	28
2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Perkebunan.....	28
2.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah.....	28
2.2.2. Isu Strategis	33
BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN	38
3.1 Tujuan RENSTRA Dinas Perkebunan Tahun 2025-2029	38
3.2 Sasaran RENSTRA Dinas Perkebunan Tahun 2025-2029	39
3.3. Strategi Dinas Perkebunan dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran RENSTRA Tahun PD 2025-2029	42
3.4. Arah Kebijakan Dinas Perkebunan dalam Mencapai Tujuan dan	

Sasaran RENSTRA Tahun PD 2025-2029	44
BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYENGKARAAN BIDANG URUSAN.....	48
4.1 Uraian Program.....	48
4.2 Uraian Kegiatan.....	50
4.3 Uraian Subkegiatan.....	51
4.4 Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah.....	95
4.5 Indikator Kinerja Utama Dinas Perkebunan.....	95
BAB V. PENUTUP	97

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Pegawai Negeri Sipil (PNS) Berdasarkan Golongan	12
Tabel 2.2	Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Berdasarkan Golongan	12
Tabel 2.3	Aparatur Sipil Negara (ASN)) Berdasarkan Esselon	13
Tabel 2.4	Pegawai Negeri Sipil (PNS) Berdasarkan Pendidikan	13
Tabel 2.5	Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Berdasarkan Pendidikan	13
Tabel 2.6	Aset Dinas Perkebunan Kabuaten Kutai Kartanegara	14
Tabel 2.7	Sarana dan Prasarana Dinas Perkebunan.....	14
Tabel 2.8	Unit Usaha Dinas Perkebunan	16
Tabel 2.9	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara dari Tahun 2021- 2024	17
Tabel 2.10	Realisasi Tanam Perusahaan Perkebunan Sawit dan Karet di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024	21
Tabel 2.11	Produktivitas Komoditi Perkebunan Rakyat Di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022-2024	23
Tabel 2.12	Prasarana Perkebunan yang Dibangun oleh Dinas Perkebunan Di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022-2024	23
Tabel 2.13	Sarana perkebunan yang diserahkan kepada kelompok tani oleh Dinas Perkebunan Di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022-2024	24
Tabel 2.14	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara dari Tahun 2021 s/d 2026	26
Tabel 2.15	Kelompok Sasaran Layanan Dinas Perkebunan	27
Tabel 2.16	Pemetaan Permasalahan Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029	32
Tabel 2.17	Teknis Menyimpulkan Isu Strategis Dinas Perkebunan	34
Tabel 3.1	Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029	41
Tabel 3.2	Penetapan RENSTRA Dinas Perkebunan	44
Tabel 3.3	Teknik Merumuskan Arah Kebijakan RENSTRA	45
Tabel 3.4	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan RENSTRA ..	47
Tabel 4.2	Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/SubKegiatan	

	RENSTRA Dinas Perkebunan	52
Tabel 4.3	Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan	75
Tabel 4.4	Daftar Subkegiatan Prioritas Dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	95
Tabel 4.5	Indikator Kinerja Utama Dinas Perkebunan	96

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Struktur Organisasi Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara	11
Gambar 3.1	Konsep RENSTRA Dinas Perkebunan	40
Gambar 3.2	Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD Dengan Tujuan RENSTRA Dinas Perkebunan	40
Gambar 4.1	Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan RENSTRA Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara	48

DAFTAR LAMPIRAN

Gambar 1	Pohon Kinerja Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara	99
----------	---	----

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029 pada tanggal 23 Juni 2025 menandai periode baru pembangunan jangka menengah daerah. Visi, misi, dan program prioritas Kepala Daerah dijabarkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029. Arah kebijakan Pembangunan Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara 2025–2029 ditentukan dan sejalan dengan RPJMD Tahun 2025-2029. RENSTRA Dinas Perkebunan memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan, dan subkegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pertanian khususnya sub sektor Perkebunan sesuai dengan tugas dan fungsi, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Dokumen RENSTRA Dinas Perkebunan tahun 2025-2029 disusun dengan menerapkan Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) urusan pertanian. Penyusunan RENSTRA Dinas Perkebunan selain berpedoman pada RPJMD, juga diselaraskan dengan RENSTRA Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur. Penyusunan dokumen ini menerapkan prinsip kesetaraan gender, disabilitas dan inklusi sosial untuk memastikan pembangunan subsektor perkebunan berjalan inklusif dan memberikan manfaat yang adil bagi seluruh kelompok masyarakat.

Proses penyusunan RENSTRA Perangkat Daerah berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Strategi Perangkat Daerah Tahun 2025–2029, meliputi : Persiapan Penyusunan RENSTRA Perangkat Daerah, Penyusunan Rancangan Awal Perangkat Daerah, Forum perangkat daerah/lintas Perangkat Daerah, Penyusunan Rancangan RENSTRA Perangkat Daerah, Penyusunan Rancangan Akhir RENSTRA Perangkat Daerah dan Penetapan RENSTRA Perangkat Daerah. Pelaksanaan penyusunan dokumen melibatkan berbagai pihak yang berperan dalam pembangunan bidang pertanian khususnya sub sektor perkebunan.

RENSTRA Perangkat Daerah menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah setiap tahun. Program, kegiatan, dan subkegiatan yang ditetapkan dalam Renja Perangkat Daerah harus

berpedoman pada program, kegiatan dan subkegiatan dalam RENSTRA Perangkat Daerah. Selanjutnya, Renja Perangkat Daerah akan menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD.

Dokumen RENSTRA ini digunakan sebagai instrumen perencanaan, penganggaran, pengendalian, dan evaluasi kebijakan, sekaligus berfungsi sebagai pengukur keberhasilan kinerja Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara. Dokumen RENSTRA yang terencana dengan baik dapat memberikan arah yang jelas untuk pembangunan perkebunan di Kabupaten Kutai Kartanegara. Pembangunan perkebunan diharapkan dapat meningkatkan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat. Lebih lanjut, pemindahan Ibu Kota Negara menjadi daya dukung percepatan pembangunan perkebunan di Kabupaten Kutai Kartanegara. Dapat dipastikan akan terjadi peningkatan kebutuhan terhadap komoditas perkebunan dalam mendukung pembangunan IKN itu sendiri, seperti kebutuhan komoditi Lada, Kelapa Dalam, Kopi, Kakao, dan Aren. Dokumen Renstra di bidang Sub Sektor Perkebunan juga disusun dengan memastikan bahwa seluruh kebijakan, pelayanan, dan program pembangunan memberikan manfaat yang adil dan setara bagi petani kecil, pembudidaya, perempuan petani, penyandang disabilitas, pelaku usaha mikro perkebunan, masyarakat adat, serta kelompok rentan lainnya.

Kebijakan pembangunan sektor perkebunan juga mendukung pelaksanaan ekonomi hijau dan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) yang menjadi salah satu perhatian dalam RPJMD. Upaya ini memerlukan penguatan kapasitas pelaku perkebunan, baik perusahaan besar maupun pekebun rakyat, melalui penyuluhan, pendampingan teknis, dan pemanfaatan inovasi digital, sehingga dibutuhkan adanya koordinasi, sinergi dan sistem monitoring yang terpadu. Integrasi kebijakan antar sub sektor lingkup pertanian di Kabupaten Kutai Kartanegara dapat berkembang secara inklusif, rendah emisi, dan berkelanjutan, sekaligus mendukung pencapaian target pembangunan daerah yang menempatkan keberlanjutan lingkungan sebagai salah satu fondasi utama.

1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Beberapa peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaannya yang menjadi dasar penyusunan RENSTRA Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2024 Nomor 194);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2025 Nomor 19);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029;
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029; (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2023-2042 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023 Nomor 163);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 Nomor 180);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 10 Tahun 2025 tanggal 23 Desember 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029.
15. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 34 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Perkebunan; dan
16. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 30 tahun 2024 tentang Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Tahun 2024 -2026.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

RENSTRA Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2025 -2029 disusun dengan maksud memberikan arahan kebijakan pembangunan jangka menengah di sub bidang perkebunan bagi para pemangku kepentingan, yang disusun berpedoman pada RPJMD Kabupaten Kutai

Kartanegara Tahun 2025-2029. Dengan dokumen ini, diharapkan pembangunan di sub bidang perkebunan dapat berjalan secara efisien dan efektif serta didasarkan pada prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*) serta pembangunan inklusif dan berkelanjutan.

Tujuan penyusunan RENSTRA Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2025–2029 adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi capaian kinerja pembangunan Dinas Perkebunan.
2. Merumuskan permasalahan dan isu strategis bidang perkebunan.
3. Menetapkan tujuan dan sasaran pembangunan bidang perkebunan untuk periode 5 (lima) tahun kedepan.
4. Menetapkan strategi dan arah kebijakan pembangunan untuk mencapai tujuan dan sasaran.
5. Menyediakan rencana program, kegiatan, dan subkegiatan yang disertai dengan indikator kinerja, target, dan pagu indikatif.
6. Menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perkebunan.
7. Menyiapkan pedoman bagi penyusunan Renja Perangkat Daerah.
8. Menjadi tolak ukur serta bahan evaluasi kinerja penyelenggaraan pembangunan bidang perkebunan.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Dokumen RENSTRA Dinas Perkebunan disusun berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025. Penyajian dokumen terdiri atas 5 (lima) bab, sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan berisi tentang;

1. Latar Belakang.
2. Dasar Hukum Penyusunan.
3. Maksud dan Tujuan.
4. Sistematika Penulisan.

BAB II Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah berisi tentang;

1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah;
 - a. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah.
 - b. Sumber Daya Perangkat Daerah.
 - c. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.
 - d. Kelompok Sasaran Layanan Perangkat Daerah.
 - e. Mitra Perangkat Daerah Perangkat Daerah.

2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah;
 - a. Permasalahan Dinas Perkebunan.
 - b. Isu Strategis.

BAB III Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan;

1. Tujuan RENSTRA PD Kabupaten Tahun 2025-2029.
2. Sasaran RENSTRA PD Kabupaten Tahun 2025-2029.
3. Strategi Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran RENSTRA PD Tahun 2025-2029.
4. Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran RENSTRA PD Tahun 2025-2029.

BAB IV Program, Kegiatan, Subkegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan;

1. Uraian Program.
2. Uraian Kegiatan.
3. Uraian Subkegiatan.
4. Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah.
5. Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah.

BAB V Penutup.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS DINAS PERKEBUNAN

2.1 GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Tugas dan Fungsi Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara ditetapkan dalam Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 34 Tahun 2021, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Dinas Perkebunan. Selain itu juga berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 17 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 34 Tahun 2021 tersebut, maka kedudukan, tugas dan fungsi Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara adalah sebagai berikut:
Tugas : Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas Pembantuan di Bidang Perkebunan.

Fungsi : Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a) perumusan kebijakan di bidang perkebunan.
- b) pelaksanaan kebijakan di bidang perkebunan.
- c) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perkebunan.
- d) pelaksanaan administrasi dinas di bidang perkebunan, dan
- e) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Sedangkan tugas dan fungsi serta tata kerja dinas perkebunan, struktur organisasi beserta tugas pokok dan fungsinya sebagaimana berikut :

1. Tugas dan Fungsi Kepala Dinas diantaranya adalah:

- a) Memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengawasi kegiatan dinas.
- b) Merumuskan kebijakan teknis dinas.
- c) Merumuskan rencana program kerja dinas.
- d) Mengkoordinasikan pelaksanaan program dinas.

2. Tugas dan Fungsi Sekretaris Dinas diantaranya adalah:
 - a) Memimpin, membimbing, membagi tugas, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan.
 - b) Mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan urusan kesekretariatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
 - c) Mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengawasi kegiatan dilingkungan Dinas yang meliputi perencanaan, anggaran, pengadaan, penyediaan sarana dan prasarana, pembinaan dan pengembangan.
 - d) Mengkoordinasikan pelaksanaan *E-Government*, kompilasi SOP, Standar Pelayanan (SP), Perjanjian Kinerja, keterbukaan informasi publik, Tim Manajemen Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Pengembangan Inovasi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), zona integritas, penataan perundang-undangan, penataan dan penguatan organisasi, Gratifikasi, Layanan Pengaduan Masyarakat, *Whistle Blowing System (WBS)* pedoman umum sistem penanganan pengaduan, survei indeks kepuasan masyarakat, survei internal organisasi, survei indeks nilai persepsi korupsi.
 - e) Mengkoordinasikan pelaksanaan LKjIP, Sistem Akuntabilitas Kinerja (SAKIP), Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), RENSTRA, RENJA, LKPJ, LPPD, dan LKPD; dll
3. Tugas dan Fungsi Kepala Bidang Pengembangan dan Perbenihan diantaranya adalah :
 - a) Memimpin, membimbing, membagi tugas, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan.
 - b) Mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan rencana kegiatan urusan Pengembangan dan Perbenihan meliputi Penyiapan dan Pemanfaatan Lahan, Pengembangan Areal dan Perbenihan sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
 - c) Mengkoordinasikan penyusunan dan penyiapan bahan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Bidang Pengembangan dan Perbenihan.
 - d) Mengkoordinasikan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja dan Standar Operasional Prosedur (SOP) urusan Pengembangan dan Perbenihan.
 - e) Mengkoordinasikan dan mengendalikan penyiapan bahan

penyusunan kebijakan Daerah urusan Pengembangan dan Perbenihan.

- f) Mengkoordinasikan dan melaporkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Pengembangan dan Perbenihan.

4. Tugas dan Fungsi Kepala Bidang Produksi diantaranya adalah :

- a) Memimpin, membimbing, membagi tugas, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan.
- b) Mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan urusan Produksi meliputi Teknologi dan Budidaya, Sarana dan Prasarana, serta Alat dan Mesin sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- c) Mengkoordinasikan penyiapan bahan dan penyusunan penetapan petunjuk teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Bidang Produksi.
- d) Mengkoordinasikan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja dan Standar Operasional Prosedur (SOP) urusan Produksi.
- e) Mengkoordinasikan dan mengendalikan penyiapan bahan penyusunan kebijakan Daerah urusan Produksi.

5. Tugas dan Fungsi Kepala Bidang Usaha dan Penyuluhan diantaranya adalah :

- a) Memimpin, membimbing, membagi tugas, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan.
- b) Mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan urusan Usaha dan Penyuluhan meliputi Pembinaan dan Gangguan Usaha, Pengolahan dan Pemasaran Hasil, dan Penyuluhan sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- c) Mengkoordinasikan penyusunan penetapan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Bidang Usaha dan Penyuluhan.
- d) Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan teknis bidang usaha dan penyuluhan.

6. Tugas dan Fungsi Kepala Bidang Perlindungan diantaranya adalah:

- a) Memimpin, membimbing, membagi tugas, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan.
- b) Mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan urusan Perlindungan meliputi Pengamatan dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT), Pengendalian

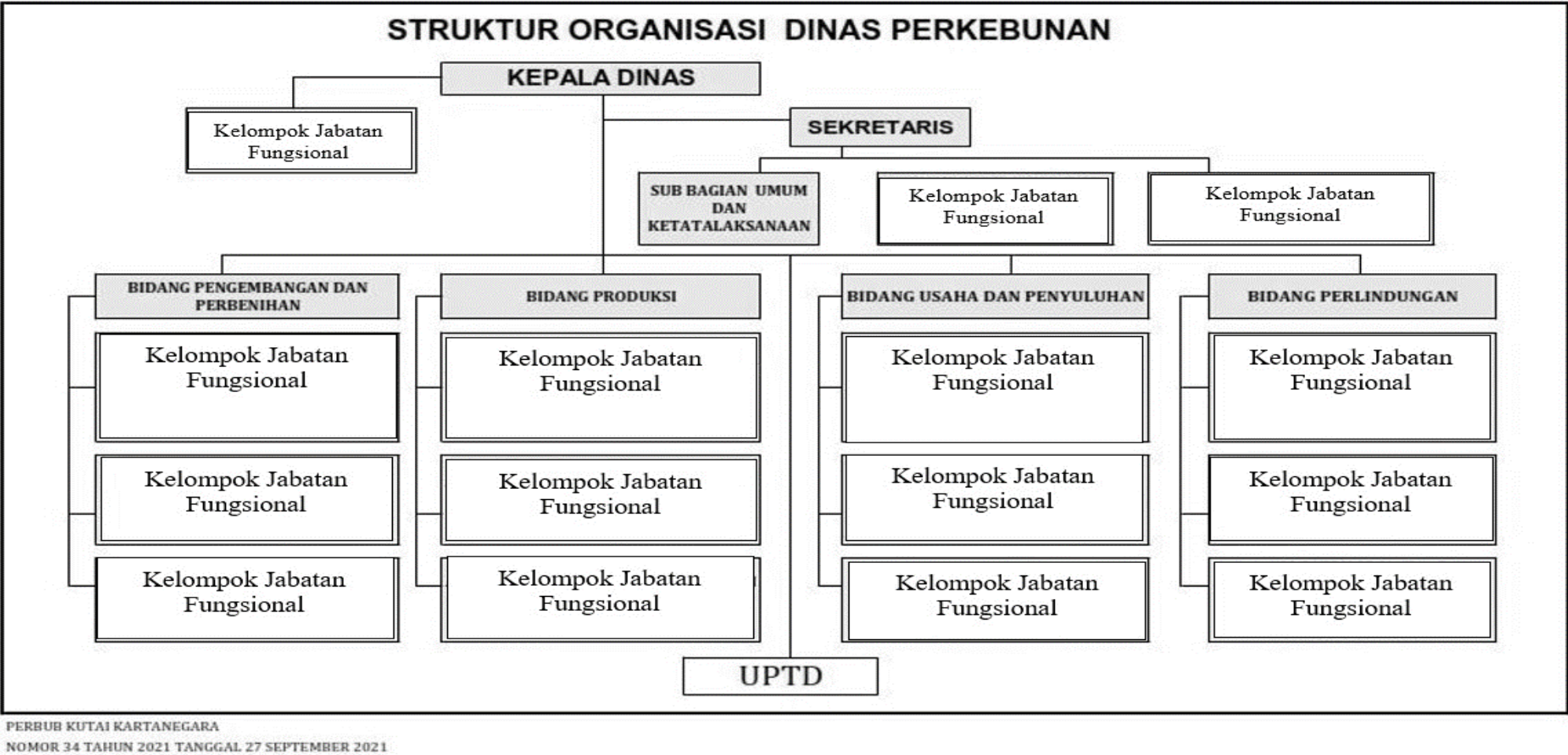
Lingkungan, dan Sarana Perlindungan sebagai pedoman pelaksanaan tugas.

- c) Mengkoordinasikan penyusunan penyiapan bahan kegiatan Bidang Perlindungan.
- d) Mengkoordinasikan penyiapan bahan dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Bidang Perlindungan.
- e) Mengkoordinasikan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja, dan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) urusan Perlindungan.
- f) Mengkoordinasikan dan mengendalikan penyiapan bahan penyusunan kebijakan Daerah urusan Perlindungan.
- g) Mengkoordinasikan dan melaporkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Perlindungan.

7. Tugas dan fungsi UPTD diantaranya adalah :

- a) Mengkoordinir, mengendalikan dan memberikan advist teknis terhadap pengelolaan administrasi yang meliputi urusan umum kerumahtanggaan, kehumasan dan keprotokolan upt.
- b) Mengkoordinir, mengendalikan dan memberikan advist teknis terhadap pengelolaan pelayanan aparatur yang meliputi urusan kepegawaian, keuangan, peralatan dan perlengkapan upt.
- c) Melakukan koordinasi dengan satuan kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang menjadi beban dan tanggungjawab.
- d) Melakukan monitoring dan evaluasi serta pelaporan terhadap perkembangan penyelenggaraan pelaksanaan tugas dan fungsi yang telah dilimpahkan.
- e) Mengkoordinir, mengendalikan dan memberikan advist teknis terhadap pengelolaan urusan teknis yang dilimpahkan.

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara



2.1.2 SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

2.1.2.1 Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Perangkat Daerah

Pelaksanaan Pembangunan Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara didukung oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Hingga bulan Desember tahun 2025 jumlah PNS adalah sebanyak 96 orang, PPPK sebanyak 66 Orang, sedangkan jumlah PPPK paruh waktu sebanyak adalah sebanyak 3 orang, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.1 Pegawai Negeri Sipil (PNS) Berdasarkan Golongan

No	Golongan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Pria	Wanita	
1	IV/C	0 Orang	0 Orang	0 Orang
2	IV/B	2 Orang	0 Orang	2 Orang
3	IV/A	6 Orang	4 Orang	10 Orang
4	III/D	8 Orang	13 Orang	21 Orang
5	III/C	1 Orang	2 Orang	3 Orang
6	III/B	5 Orang	2 Orang	7 Orang
7	III/A	6 Orang	5 Orang	11 Orang
8	II/D	24 Orang	12 Orang	36 Orang
9	II/C	5 Orang	0 Orang	5 Orang
10	II/B	0 Orang	0 Orang	0 Orang
11	II/A	1 Orang	0 Orang	1 Orang
12	I/D	0 Orang	0 Orang	0 Orang
13	I/C	0 Orang	0 Orang	0 Orang
14	I/B	0 Orang	0 Orang	0 Orang
Jumlah		58 Orang	38 Orang	96 Orang

Sumber Data: Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara (Desember 2025)

Tabel 2.2 Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Berdasarkan Golongan

No	Golongan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Pria	Wanita	
1	IX	12 Orang	15 Orang	27 Orang
2	VII	0 Orang	2 Orang	2 Orang
3	V	27 Orang	12 Orang	39 Orang
4	I	1 Orang	0 Orang	1 Orang
Jumlah		40 Orang	29 Orang	69 Orang

Sumber Data: Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara (Desember 2025)

Tabel 2.3 Aparatur Sipil Negara (ASN) Berdasarkan Esselon

No	Esselon	Jenis Kelamin		Jumlah
		Pria	Wanita	
1	Esselon II/B	0 Orang	0 Orang	0 Orang
2	Esselon III/A	1 Orang	0 Orang	1 Orang
3	Esselon III/B	4 Orang	0 Orang	4 Orang
4	Esselon IV/A	0 Orang	1 Orang	1 Orang
5	Esselon IV/B	1 Orang	0 Orang	1 Orang
6	Non Esselon	52 Orang	37 Orang	89 Orang
7	PPPK	37 Orang	29 Orang	66 Orang
8	PPPK Paruh Waktu	3 Orang	0 Orang	3 Orang
Jumlah		98 Orang	67 Orang	165 Orang

Sumber Data: Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara (Desember 2025)

Tabel 2.4 Pegawai Negeri Sipil (PNS) Berdasarkan Pendidikan

No	Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Pria	Wanita	
1	SD	0 Orang	0 Orang	0 Orang
2	SLTP	1 Orang	0 Orang	1 Orang
3	SLTA	30 Orang	13 Orang	43 Orang
4	DIPLOMA 1	0 Orang	0 Orang	0 Orang
5	DIPLOMA 2	0 Orang	0 Orang	0 Orang
6	DIPLOMA 3	2 Orang	1 Orang	3 Orang
7	SARJANA (S 1)	18 Orang	19 Orang	37 Orang
8	PASCA SARJANA (S2)	8 Orang	5 Orang	13 Orang
Jumlah		58 Orang	38 Orang	96 Orang

Sumber Data: Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara (Desember 2025)

Tabel 2.5 Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Berdasarkan Pendidikan

No	Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Pria	Wanita	
1	SD	1 Orang	0 Orang	0 Orang
2	SLTA	27 Orang	12 Orang	39 Orang
3	DIPLOMA 3	0 Orang	2 Orang	2 Orang
4	SARJANA (S1)	12 Orang	15 Orang	27 Orang
Jumlah		40 Orang	29 Orang	69 Orang

Sumber Data: Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara (Desember 2025)

2.1.2.2 Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana perkantoran maupun lapangan merupakan suatu kebutuhan penunjang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Perkebunan. Kelengkapan dan kualitas sarana dan

prasarana akan menentukan efektivitas pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan sektor perkebunan, baik dari sisi administrasi maupun lapangan yang erat kaitannya langsung dengan petani perkebunan. Sarana dan prasarana yang tersedia di Dinas Perkebunan berasal dari anggaran APBD Tingkat I, APBD Tingkat II maupun APBN, dimana dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 2.6 Aset Dinas Perkebunan Kabuaten Kutai Kartanegara

No	Uraian	Jumlah	Nilai
1	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	900 M ²	Rp. 315.000.000,-
2	Perkebunan Lain-lain	29,96 Ha	Rp. 1.545.920.340,-
3	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	7.743 M ²	Rp. 1.990.550.000,-
4	Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya	3.360,37 M ²	Rp. 156.783.130,-
5	Tanah Perkebunan Lainnya	10.480 M ²	Rp. 37.957.500,-

Sumber Data: Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara (September 2025)

Tabel 2.7 Sarana dan Prasarana Dinas Perkebunan

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah	Keterangan
1	Kendaraan Roda 4	8 Unit	Baik
2	Kendaraan Roda 2	78 Unit	25 baik, 40 kurang baik, 13 rusak berat
3	AC Split	22 Unit	Kurang baik
4	AC Window	7 Unit	Kurang baik
5	Alat Dapur Lainnya	2 Unit	Rusak berat
6	Alat Kantor Lainnya (Lain-lain)	5 Unit	Rusak berat
7	Alat Kantor Lainnya (Lain-lain)	3 Unit	Rusak berat
8	Alat Kantor Lainnya (Lain-lain)	18 Unit	Kurang baik
9	Alat Pemadam Kebakaran Lain-lain	6 Unit	Rusak berat
10	Alat Penghancur Kertas	2 Unit	Kurang baik
11	Alat Rumah Tangga Lain-lain	10 Unit	Rusak berat
12	Amplifiler	1 Unit	Kurang baik
13	CCTV	9 Unit	Kurang baik
14	Digitzer	1 Unit	Rusak berat
15	Dispenser	1 Unit	Baik
16	Portabel Generating Set	1 Unit	Kurang baik
17	Facsimile	1 Unit	Rusak berat
18	Filling Besi/Metal	10 Unit	Kurang baik
19	Fire Hose (Selang Pemadam Kebakaran)	4 Unit	Kura baik
20	Global Positioning System	21 Unit	Kurang baik
21	Gorden	3 Unit	Rusak berat
22	Hard Disk	4 Unit	Rusak berat
23	Kendaraan Bermotor Khusus Lain-lain	1 Unit	Kurang baik
24	Kipas Angin	4 Unit	Rusak berat
25	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	61 Unit	Kurang baik
26	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	6 Unit	Kurang baik

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah	Keterangan
27	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	4 Unit	Kurang baik
28	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	15 Unit	Kurang baik
29	Kursi Lipat	438 Unit	200 baik, 238 rusak berat
30	Kursi Rapat	23 Unit	Kurang baik
31	Kursi Tamu	7 Unit	Kurang baik
32	Lap Top	23 Unit	13 baik, 10 rusak berat
33	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	21 Unit	Kurang baik
34	Lemari Buku untuk Pejabat Eselon II	1 Unit	Baik
35	Lemari dan Arsip Pejabat Eselon III	1 Unit	Baik
36	Lemari Es	2 Unit	Baik
37	Lemari Kayu	16 Unit	Rusak berat
38	Meja Biro 1/2	47 Unit	Kurang baik
39	Meja Kerja	16 Unit	Kurang baik
40	Meja Resepsionis	4 Unit	Baik
41	Meja Rapat	20 Unit	Kurang baik
42	Mesin Absensi	5 Unit	2 baik, 3 rusak berat
43	Mesin Pemotong Rumput	4 Unit	4 kurang baik
44	Mesin Bor Tangan	2 Unit	Baik
45	Mesin Ketik	5 Unit	Baik
46	Mesin Penghisap Debu	2 Unit	Baik
47	Mic Conference	2 Unit	Baik
48	Video Monitor	2 Unit	Baik
49	PC Unit	57 Unit	35 baik, 22 rusak berat
50	Papan Visual	1 Unit	Kurang baik
51	Spray Gun	2 Unit	Kurang baik
52	Peralatan Jaringan Lain-lain	2 Unit	Baik
53	Peralatan Personal Komputer (printer)	46 Unit	35 baik, 11 rusak berat
54	Peralatan Personal Komputer (scanner)	8 Unit	Baik
55	Pesawat Telephone	4 Unit	Baik
56	Server	1 Unit	Rusak berat
57	Sofa	21 Unit	Kurang baik
58	Sound System	4 Unit	Kurang baik
59	Tangga Alumunium	1 Unit	Rusak berat
60	Televisi	15 Unit	5 baik, 10 rusak berat
61	Trafo Stater	1 Unit	Baik
62	Unintemuptible Power Supply (UPS)	4 Unit	Rusak berat
63	Wireless	6 Unit	Kurang baik
Total		1.122 Unit	

Sumber Data: Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara (September 2025)

2.1.2.3 Unit Usaha Dinas Perkebunan

Hingga tahun 2024 Dinas Perkebunan telah memiliki Kebun Dinas seluas 26 Ha yang tersebar di 2 Kecamatan yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.8 Unit Usaha Dinas Perkebunan

No	Uraian	Luas		Komoditi
		Lahan	Tanaman	
1	Kebun Dinas Di Kecamatan Kembang Janggut	4 Ha	3,5 Ha	Kelapa Sawit
2	Kebun Dinas Di Kecamatan Tenggarong Kelurahan Loa Ipuh Darat	22 Ha	12,0 Ha	Kelapa Sawit
Jumlah		26 Ha	15,5 Ha	

Sumber Data: Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara (Desember 2025)

2.1.3 KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1.3.1 Capaian Indikator Kinerja

Akuntabilitas kinerja Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara diukur dari tingkat keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang dituangkan dalam RENSTRA. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Analisis kinerja pelayanan Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap RENSTRA Tahun 2021 s/d 2026 dihitung dengan cara membandingkan anantara capaian kinerja pelayanan dengan perjanjian kinerja sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan OPD.

Dari 3 (tiga) indikator RENSTRA Dinas Perkebunan Tahun 2021-2026 yaitu (1) Produksi komoditas perkebunan, (2) Produktivitas komoditas perkebunan dan (3) NTP Perkebunan, yang mengalami kenaikan secara konsisten adalah Indikator NTP Perkebunan, sementara untuk kedua Indikator lainnya terjadi fluktuatif.

Capaian indikator Produksi Tanaman Komoditas Perkebunan didukung oleh 3 (tiga) indikator program yaitu: Luas Areal Tanaman Perkebunan, Panjang Jalan Produksi Perkebunan yang Dibangun dan Jumlah Embung yang Dibangun. Untuk lebih detail Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara dari Tahun 2022 s/d 2024 dapat dilihat pada Tabel di bawah ini:

Tabel 2.9 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara dari Tahun 2022 s/d 2024

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target RENSTRA Tahun					Realisasi Capaian Tahun			Rasio Capaian Tahun		
		2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2022	2023	2024
	Pertumbuhan Ekonomi Sub Sektor Perkebunan	2,20	3,50	3,60	3,80	4,10	1,08	2,95	4,69	49,09	84,29	130,27
1	1. Produksi Sawit Rakyat (Ton)	267.635	277.032	286.069	294.694	302.874	283.373	291.773	349.921	105,88	105,32	122,23
	2. Produksi Sawit PBS (Ton)	2.924.513	3.064.670	3.276.022	3.395.024	3.665.404	2.733.200	3.071.285	3.112.418	93,46	100,22	101,55
	3. Produksi Karet (Ton)	9.238	9.616	10.031	10.488	10.992	10.365	10.293	13.291	112,20	107,04	132,49
	4. Produksi Lada (Ton)	1.815	2.001	2.207	2.437	2.694	2.490	2.690	1.936	137,19	134,43	87,72
	5. Produksi Kelapa (Ton)	2.510	2.706	2.936	3.206	3.525	2.619	3.456	3.640	104,34	127,72	123,97
	6. Produksi Kopi (Ton)	8	14	23	40	65	10	11,06	13	125,00	79,00	56,52
	7. Produksi Kakao (Ton)	34	39	48	66	84	31	30,25	29	91,18	77,56	60,41
	8. Produksi Aren (Ton)	392	446	510	584	671	410	394,54	469	104,59	88,46	91,96
	9. Produksi Kelor (Ton)	6	8	12	13	13	0,5	0,5	-	8,33	6,25	0
2	1. Produktivitas Sawit Rakyat (Kg/Ha)	14.067	14.510	14.931	15.327	15.698	12.947	12.818	13.703	92,04	88,34	91,77
	2. Produktivitas Sawit PBS (Kg/Ha)	1.713	17.540	18.330	18.580	19.630	15.523	16.286	14.997	906,19	92,85	87,88
	3. Produktivitas Karet (Kg/Ha)	943	978	1.017	1.059	1.106	1.006	993	1.239	106,68	101,51	121,82
	4. Produktivitas Lada (Kg/Ha)	639	700	768	845	929	950	1.035	1.272	148,67	147,86	165,62
	5. Produktivitas Kelapa (Kg/Ha)	441	472	509	552	603	482	652	699	109,30	138,14	137,32
	6. Produktivitas Kopi (Kg/Ha)	311	420	517	617	767	357	357	385	114,79	84,76	74,46
	7. Produktivitas Kakao (Kg/Ha)	681	718	747	806	940	776	817	827	113,95	113,79	110,70
	8. Produktivitas Aren(Kg/Ha)	2.658	2.926	3.255	3.637	4.080	2.876	2.702	2.712	108,20	92,34	83,31
	9. Produktivitas Kelor (Kg/Ha)	1.233	1.262	1.371	1.471	1.571	1.000	1.000	-	81,10	79,24	0
3	NTP Perkebunan (Nilai)	98	100	102	104	106	158	167	208	161,22	166,83	203,92

Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target RENSTRA Tahun					Realisasi Capaian Tahun			Rasio Capaian Tahun		
		2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2022	2023	2024
4	Predikat Akuntabilitas Kinerja Dinas Perkebunan (Nilai)	77,50	78,00	78,50	79,00	79,50	86,00	73,72	73,72	110,96	94,51	93,91
5	1. Luas Areal Sawit Rakyat (Ha)	28.570	28.645	28.720	28.795	28.880	30.101	30.433	31.585	105,36	106,24	110,18
	2. Luas Areal Sawit PBS (Ha)	214.116	237.435	268.526	307.390	346.255	196.744	199.736	222.940	91,89	84,12	76,52
	3. Luas Areal Karet (Ha)	17.898	17.928	17.958	17.988	18.033	18.009	18.080	17.543	100,62	100,85	98,56
	4. Luas Areal Lada (Ha)	3.402	3.412	3.427	3.442	3.452	3.178	3.016	1.879	93,42	88,39	82,00
	5. Luas Areal Kelapa (Ha)	7.286	7.291	7.301	7.306	7.311	7.107	6.886	6.796	97,54	94,45	92,97
	6. Luas Areal Kopi (Ha)	78	89	110	115	125	84	109	105	107,69	122,47	95,45
	7. Luas Areal Kakao (Ha)	80	85	95	95	100	82	122	141	102,50	143,53	148,42
	8. Luas Areal Aren (Ha)	237	243	248	248	253	256	251	266	108,02	103,29	108,47
	9. Luas Areal Kelor (Ha)	5	7	9	9	9	2	4	0	40,00	57,14	0,00
6	1. Panjang Jalan Produksi Perkebunan Yang Dibangun (Meter)	3.600	3.600	4.000	4.000	4.800	3.500	7.000	4.636.50	97,22	194,44	128,65
	2. Jumlah Embung Yang Dibangun (Unit)	3	4	4	5	4	3	2	1	100	50	25
7	Persentase Penurunan Gangguan OPT Perkebunan (Persen)	88.67	72.00	56.00	38.67	20.00	88	72	56	99,24	100	100
8	1. Jumlah Penerbitan STDB (Surat STDB)	200	200	200	200	200	203	200	207	101,5	100	103,5
	2. Jumlah Perusahaan Yang Mendapat Sertifikat Penilaian Usaha Perkebunan (Surat PUP)	11	3	20	10	3	10	3	16	90,90	100	80
9	Persentase Kenaikan Kelas Kelompok Tani (Persen)	4.77	9.76	14.63	19.62	24.60	4.8	9.76	14	100,63	100,00	95,69
10	Jumlah dokumen rencana. anggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9	9	9	9	9	9	9	6	100	100	66.66
11	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	15	15	15	15	15	15	15	15	100	100	100
12	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100

Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target RENSTRA Tahun					Realisasi Capaian Tahun			Rasio Capaian Tahun		
		2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2022	2023	2024
13	Jumlah Dokumen Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	1	1	1	1	1	0	1	1	0	100	100
14	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	2	2	2	2	2	2	3	2	100	150	100
15	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	7	7	7	7	7	7	6	6	100	85,71	85,71
16	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	0	9	0	1	0	0	45	1	-	500	100
17	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100
18	Jumlah Barang Milik Daerah	104	130	130	130	130	104	107	119	100	82,30	91,53
19	Jumlah Sarana Pertanian Yang Diawasi	409	296	220	142	182	375	1426	777	91,68	481,75	353,18
20	Jumlah Pengembangan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan dan Tumbuhan	2	1	1	1	1	2	1	1	100	100	100
21	Jumlah Prasarana Pertanian Yang Dikembangkan	2	1	2	1	2	2	0	0	100	0	0
22	Jumlah Prasarana Pertanian Yang Dibangun	21	7	7	10	5	16	22	43	76,19	314,28	614,28
23	Luas Pengendalian OPT Dan Bencana Perkebunan	200	220	240	260	280	200	220	240	100	100	100
24	Jumlah Pemegang Tanda Daftar Budidaya dan Izin Usaha Perkebunan Yang Dibina	211	203	220	210	203	213	203	223	100,948	100	101,36
25	Jumlah Kelembagaan Petani Perkebunan dan Pekebun Milenial yang dibina	47	49	48	49	48	47	49	46	100	100	95,83

Sumber Data: Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara, 2024

Hasil evaluasi kinerja Dinas Perkebunan beberapa tahun terakhir sebagaimana dimuat pada tabel di atas, dapat ditarik beberapa kesimpulan. Capaian kinerja sektor perkebunan di Kabupaten Kutai Kartanegara menunjukkan tren positif pada beberapa indikator utama, terutama dari sisi produksi dan kontribusi ekonomi. Pertumbuhan ekonomi subsektor perkebunan mengalami peningkatan signifikan hingga mencapai 130,27% dari target pada tahun 2024, yang menunjukkan tingginya peran perkebunan terhadap perekonomian daerah. Komoditas unggulan seperti sawit rakyat, karet, dan kelapa juga memperlihatkan capaian produksi yang melampaui target dengan tingkat capaian di atas 100% pada sebagian besar tahun pengamatan. Hal ini menandakan adanya peningkatan aktivitas budidaya serta tata kelola kebun rakyat yang semakin produktif.

Aspek produktivitas juga ditemukan pertumbuhan positif pada sebagian besar komoditas. Produktivitas karet, lada, dan kelapa konsisten melampaui target dengan capaian hingga 165,62% untuk lada, menunjukkan efektivitas pembinaan yang dilakukan terhadap petani pekebun. Namun demikian, beberapa komoditas seperti kopi, kakao, aren, dan kelor memiliki tingkat capaian produktivitas yang fluktuatif dan belum sepenuhnya memenuhi target yang diharapkan. Selain itu, data juga memperlihatkan bahwa jumlah kelembagaan dan izin usaha perkebunan yang dibina tetap terjaga dan pada beberapa tahun melampaui target penilaian.

Meskipun terdapat capaian yang baik, masih ditemukan sejumlah tantangan dari sisi infrastruktur dan keberlanjutan pengembangan lahan. Sejumlah sarana produksi seperti embung dan prasarana pertanian belum memenuhi target pada 2023–2024, yang berpotensi berpengaruh terhadap stabilitas produktivitas dalam jangka panjang. Selain itu, luas areal komoditas tertentu seperti lada, kelapa, dan aren mengalami penurunan capaian pada tahun 2024, sehingga perlu perhatian terhadap keberlanjutan lahan dan rehabilitasi tanaman tua. Secara keseluruhan, performa sektor perkebunan Kutai Kartanegara telah memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan ekonomi daerah, namun peningkatan kualitas pengelolaan lahan, diversifikasi komoditas, dan penguatan infrastruktur pendukung masih diperlukan untuk menjaga daya saing perkebunan secara berkelanjutan.

Selain capaian di atas, berikut ini diuraikan kondisi perkebunan di Kabupaten Kutai Kartanegara. Saat ini luas lahan izin lahan perkebunan (IUP) di Kabupaten Kutai Kartanegara adalah seluas 407.870,91 Ha, terdiri

dari komoditi kelapa sawit dan karet. Sementara total luas yang telah dimanfaatkan menjadi kebun inti dan plasma baru seluas 173.003,87 (42,42%). Dari data ini menunjukkan bahwa terdapat 234.967,04 Ha (57,58%) dari luas IUP yang diberikan belum direalisasikan menjadi kebun kelapa dan karet. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel di bawah ini:

Tabel 2.10 Realisasi Tanam Perusahaan Perkebunan Sawit dan Karet di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024

No	Nama Perusahaan	Luas Izin (Ha)	Realisasi Tanam Inti (Ha)	Realisasi Tanam Plasma (Ha)	Jumlah (Ha)
A	Komoditi Kelapa Sawit				
1	PT. SAWIT KALTIM LESTARI	10.008,50	3.435,00	1.714,90	5.149,90
2	PT. AGROJAYA TIRTA KENCANA	20.000,00	9.187,77	1.800,00	10.987,77
3	PT. AGRIEAST BORNEO KENCANA	9.615,41	9.659,77	1.600,00	11.259,77
4	PT. JAYA MANDIRI SUKSES	21.694,12	9.586,00	2.847,31	12.433,31
5	PT. MANUNGAL ADI JAYA	14.995,00	3.828,00	553,29	4.381,29
6	PT. TEGUH JAYA PRIMA ABADI	7.234,11	3.035,03	720,33	3.755,36
7	PT. PRIMA MITRAJAYA MANDIRI	20.000,00	7.526,06	3.880,26	11.406,32
9	PT. AGRO BUMI KALTIM	14.424,00	3.690,07	1.200,16	4.890,23
10	PT. PERKEBUNAN KALTIM UTAMA I	17.000,00	2.742,28	789,16	3.531,44
11	PT. ALAM JAYA PERSADA	13.000,00	1.750,45	942,55	2.693,00
12	PT. REA KALTIM PLANTATION	30.106,00	23.016,00	2.034,00	25.050,00
13	PT. SASANA YUDHA BHAKTI	11.913,96	4.755,05	364,33	5.119,38
14	PT. PRASETIA UTAMA	8.568,44	0	0	0
15	PT. SURYA BUMI TUNGAL PERKASA	9.328,00	2.020,00	402,00	2.422,00
16	PT. KUTAI AGRO JAYA	4.179,00	2.388,30	103,00	2.491,30
17	PT. BAHTERA BAHAGIA	687,63	687,63	-	687,63
18	PT. TRITUNGAL SENTRA BUANA	14.404,00	9.484,00	2.172,48	11.656,48
19	PT. MAJU KALIMANTAN HADAPAN	16.180,10	15.012,43	1.289,11	16.301,54
20	PT. HAMPARAN SENTOSA	12.431,00	8.109,99	1.353,86	9.463,85
21	PT. CAHAYA ANUGERAH PLANTATION	7.048,16	628,00	-	628,00
22	PT. SAWIT PRIMA SAKTI	3.250,00	1883,16	300,00	2.183,16
23	PT. NIAGAMAS GEMILANG	7.900,20	5.429,79	829,90	6.259,69
24	PT. MITRA BANGGA UTAMA	12.095,00	956,93	-	956,93
25	PT. ENGGANG ALAM SAWITA	8.438,15	1.856,70	407,60	2.264,30
26	PT. TUNAS PRIMA SEJAHTERA	20.000,00	-	-	-
27	PT. SAWIT GOLDEN PRIMA	15.592,00	2.844,64	-	2.844,64
28	PT. BINA GRAHA UTAMA MAKMUR	13.000,00	-	-	-
29	PT. JONGGON GERBANG SAWIT	1.000,00	-	-	-

No	Nama Perusahaan	Luas Izin (Ha)	Realisasi Tanam Inti (Ha)	Realisasi Tanam Plasma (Ha)	Jumlah (Ha)
30	PT. PERSADA BANGUN JAYA	4.897,77	77,00	-	77,00
31	PT. MULA PERSADA RAYA	1.322,32	81,23	-	81,23
32	PT. ANDRA KARYA UTAMA	7.500,00	-	-	-
33	PT. SUKSES BINA ALAM	719,82	502,49	-	502,49
34	PT. BAKACAK HIMBA BAHARI	2.015,80	1.830,00	500,00	2.330,00
35	PT. SANDIKA DHARMA ABADI	2.216,00	-	-	-
36	PT. BUDIDUTA AGRO MAKMUR	10.520,30	3.068,97	-	3.068,97
37	PT. ANDALAS AGRIPALMA MANDIRI	2.995,00	-	-	-
38	PT. KOTA BANGUN SAWIT SEJAHTERA	1.542,46	259,00	200,00	459,00
39	PT MUARA KAMAN SAWIT SEJAHTERA	238,59	62,00	-	62,00
40	PT. AGRO RAYA MALINDO	4.792,00	-	-	-
41	KOP. BINA TANI SAWIT SEDULANG	1.600,00	300	-	300,00
42	KOP. BINA TANI SAWIT MENAMANG KIWA	300,00	300	-	300,00
43	KOP. PERKEBUNAN MAJU MEMBANGUN	800,00	773,30	-	773,30
44	KOP. PERKEBUNAN SAWIT SENDOWAN	3.500,00	1.730,11	-	1.730,11
45	KOP. PERKEBUNAN SAWIT ETAM BERSAMA	384,00	428,07	-	428,07
46	KOP. AROMA PNS KALTIM	633,99	224,02	-	224,02
47	KOP. BINA TANI SAWIT LESTARI	1.155,00	1.000	-	1.000,00
48	KOPERASI SEGUNTUNG JAYA	371,00	-	-	
49	PT. TOKOH SUKSES ALAM	5.420,66	-	-	
50	PT. WIRAWANGSA INTI SELARAS	1475,07	-	-	
51	PT. TUNAS TANI TUTUS	3.096,96	-		
52	PT. AGRO SAWIT MANDIRI	2.791,48	-		
53	PT. CEMERLANG SAWIT NUSANTARA				
	Jumlah Sawit	404.381,00	144.149,24	26.004	170.153
B	Komoditi Karet				
1	PT. RESOURCE ALAM INDONESIA	1.178	35,00	-	35,00
2	PT. BUDIDUTA AGRO MAKMUR	2.311,63	2.815,39	-	2.815,39
	Jumlah Karet	3.489,91	2.850,39	-	2.850,39
	Jumlah SAWIT+KARET	407.870,91	146.999,63	26.004,24	173.003,87

Sumber Data: Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara (2024)

Capaian produktivitas tujuh komoditas perkebunan dari tahun 2022 s/d 2024 mengalami fluktuasi. Hal ini dipengaruhi oleh faktor usia tanaman, iklim dan harga pasaran dan dengan tingkat pengaruh yang berbeda pada setiap komoditi. Untuk lebih jelasnya produktivitas komoditi disajikan pada Tabel berikut :

Tabel 2.11 Produktivitas Komoditi Perkebunan Rakyat Di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022-2024

No	Komoditi	Produktivitas (Kg/Ha)			Produktivitas Kaltim (Ton/Ha)	Potensi Produktivitas (Ton/Ha)
		2022	2023	2024		
1	Kelapa Sawit Rakyat	12.947	12.818	13.703	18.161	25.000
	Kelapa Sawit PBS	15.523	16.286	14.997	20.000	25.000
2	Karet (Lump)	1.006	993	1.239	1.398	2.400
3	Lada (biji kering)	950	1.035	1.272	884	2.000
4	Kelapa Dalam (Kopra)	482	652	699	505	1.500
5	Kopi (biji kering)	357	357	385	341	1.500
6	Kakao	776	817	827	625	1.300
7	Aren	2.876	2.702	2.712	1.129	30.000

Sumber Data: Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara (2024)

Terdapat beberapa kegiatan pembangunan prasarana perkebunan berupa pembangunan jalan produksi, pembangunan embung, pembangunan saluran irigasi atau parit kebun, pembangunan pintu air dan pembangunan unit pengolahan hasil. Kegiatan pembangunan tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.12 Prasarana Perkebunan yang Dibangun oleh Dinas Perkebunan Di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022-2024

No	Jenis Prasana yang Terbangun	Tahun			Total
		2022	2023	2024	
1	Jalan Produksi (Meter)	3.500	7.000	4.636,5	15.136,5
2	Embung (Unit)	3	2	1	6
3	Saluran Irigasi (Unit)	0	2	9	11
4	Pintu Air Kebun (Unit)	4	8	21	33
5	UPH (Unit)	1	-	1	2

Sumber Data: Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara (2022-2024)

Tabel di atas menunjukkan bahwa dari tahun 2022-2024 ada beberapa Prasana perkebunan yang dibangun oleh Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara yang tersebar di beberapa kecamatan. Pembangunan jalan produksi yang menjadi program dedikasi Pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 memiliki target 20.000 meter. Realisasi hingga tahun 2024 adalah sepanjang 15.136,5 Meter dengan rasio mencapai 75.82% selama 3 tahun pembangunan, dari target pembangunan 5 tahun.

Selain itu pembangunan embung juga menjadi program dedikasi

Pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 dengan target 20 Unit. Realisasi hingga tahun 2024 adalah sebanyak 6 unit dengan rasio mencapai 30% selama 3 tahun pembangunan dari target pembangunan 5 tahun. Hal ini dikarenakan sulitnya mencari lahan untuk pembangunan embung perkebunan. Lahan pekebun yang akan dijadikan atau dibangun embung harus dihibahkan dulu ke kelompok tani yang bersangkutan, hal ini menyebabkan tidak semua anggota kelompok yang mau menghibahkan tanahnya untuk dibangun embung.

Selain 2 (dua) program dedikasi diatas, Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara juga melakukan pembangunan prasarana lainnya yaitu pembangunan saluran irigasi atau parit kebun, dengan realisasi sampai dengan tahun 2024 sebanyak 11 unit. Pembangunan pintu air kebun dengan realisasi sampai dengan tahun 2024 sebanyak 33 unit dan pembangunan unit pengolahan hasil dengan realisasi sampai dengan tahun 2024 sebanyak 2 unit.

Selain pembangunan prasaran perkebunan, Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara juga melaksanakan kegiatan berupa sarana yang diserahkan kepada kelompok tani. Kegiatan tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 2.13 Sarana Perkebunan yang Diserahkan Kepada Kelompok Tani oleh Dinas Perkebunan di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022-2024

No	Jenis Sarana yang diserahkan	Tahun			Total
		2022	2023	2024	
1	Benih (Pohon)	9.210	126.816	118.150	244.967
2	Pupuk (Kg)	35.500	208.319	493.475	737.294
3	Herbisida (Liter)	74	5.355	64.184	69.613
4	Alat dan Mesin (Unit)	11.415	759	206	12.380

Sumber Data: Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara (2022-2024)

Tabel di atas menunjukkan bahwa dari tahun 2022-2024 ada beberapa sarana perkebunan yang diserahkan oleh Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara ke beberapa kelompok tani yang tersebar di sejumlah kecamatan. Untuk benih pohon yang diserahkan ke kelompok tani sampai dengan tahun 2024 sebanyak 244.967 pohon, sementara pupuk yang diserahkan ke kelompok tani sampai dengan tahun 2024 sebanyak 737.294 Kg, Herbisida sebanyak 69.613 Liter, serta alat dan mesin sebanyak 12.380 unit.

2.1.3.2 Realisasi Anggaran

RENSTRA Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 mengalami penyesuaian nomenklatur program, kegiatan, dan subkegiatan. Hal ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan pemuktahiran dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Selama periode ini Dinas Perkebunan menggunakan sebanyak 6 (enam) program. yaitu:

1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
2. Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian.
3. Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian.
4. Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian.
5. Perizinan Usaha Pertanian.
6. Penyuluhan Pertanian.

Perencanaan anggaran dirumuskan sedemikian rupa dalam pendanaan program kegiatan agar pembangunan dilaksanakan secara efisien dalam artian terjadi keseimbangan antara pengeluaran biaya dan upaya pencapaian tujuan dan sasaran strategis Dinas Perkebunan. Tabel di bawah ini menunjukkan gambaran pendanaan program kegiatan Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara dari tahun 2021 s/d 2024. Dari tabel tersebut menunjukkan bahwa dalam periode tahun 2021 s/d 2024, pendanaan program kegiatan bersumber dari APBD dan APBN. Pada awal RENSTRA 2021 s/d 2026 total pagu dibuat sama dari tahun 2021 s/d 2026 dengan anggaran sebesar Rp. 37.257.507.862,- tiap tahunnya, dan mengalami perubahan anggaran di setiap tahunnya pada saat penetapan APBD yaitu pada tahun 2022 sebesar Rp. 34.985.358.113,-, tahun 2023 sebesar Rp. 49.293.374.436,- dan tahun 2024 sebesar Rp 55.393.439.772,- dengan realisasi anggaran yaitu pada tahun 2022 sebesar Rp. 30.540.592.515,-, tahun 2023 sebesar Rp. 46.105.380.098,- dan tahun 2024 sebesar Rp. 45.393.518.189,-.

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara dari tahun 2022 s/d 2024 dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :

Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara

Tabel 2.14 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara dari Tahun 2021 s/d 2026

No	Program	Anggaran Pada Tahun (dalam juta)					Realisasi Anggaran Pada Tahun (dalam juta)					Rasio Antara Realisasi & Anggaran Pada Tahun (persen)					Rata-Rata Pertumbuhan (persen)	
		2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	Anggaran	Realisasi
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	24.749.301.113	24.274.278.436	27.361.866.573	31.128.457.862	30.989.257.862	21.581.423.978	22.663.462.270	21.377.537.299	-	-	87,20%	93,36%	78,13%	-	-		
2	Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	4.871.057.000	16.455.775.720	19.079.682.000	2.154.050.000	2.288.250.000	4.338.607.393	15.282.487.269	16.123.936.160	-	-	89,07%	92,93%	84,51%	-	-		
3	Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	3.915.000.000	6.421.680.280	7.465.937.219	2.625.000.000	2.680.000.000	3.334.941.786	6.253.462.340	6.519.020.235	-	-	85,12%	97,38%	87,32%	-	-		
4	Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	450.000.000	1.258.000.000	535.953.980	450.000.000	450.000.000	418.404.600	1.029.431.020	485.854.069	-	-	92,98%	81,83%	90,65%	-	-		
5	Perizinan Usaha Pertanian	400.000.000	343.640.000	300.000.000	250.000.000	250.000.000	380.343.200	330.212.207	246.765.437	-	-	95,08%	96,09%	82,26%	-	-		
6	Penyuluhan Pertanian	600.000.000	550.000.000	650.000.000	650.000.000	600.000.000	486.872.558	546.324.992	640.404.989	-	-	81,15%	99,33%	98,52%	-	-		
Total		34.985.358.113	49.293.374.436	55.393.439.772	37.257.507.862	37.257.507.862	30.540.593.515	46.105.380.089	45.393.518.189	-	-	87,30%	93,53%	81,95%	-	-		

Sumber Data: Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara (2024)

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran layanan adalah pihak yang memperoleh manfaat dari Subkegiatan atau kebijakan Dinas Perkebunan. Dalam melaksanakan pelayanan kelompok sasaran Dinas Perkebunan sebagai berikut:

Tabel 2.15 Kelompok Sasaran Layanan Dinas Perkebunan

No.	Tugas dan Fungsi	Kelompok Sasaran
1	Pelaksanaan Kebijakan Teknis Kegiatan Urusan Usaha Dan Penyuluhan	Pelaku usaha (Poktan/gapoktan/PBS/Koperasi)
2	Pelaksanaan Kebijakan Dan Kegiatan Teknis Urusan Produksi	Poktan/Gapoktan
3	Pelaksanaan Kebijakan dan Kegiatan Teknis Urusan Perlindungan Perkebunan	Poktan/Gapoktan/KTPA/PBS/Forum Masyarakat Perkebunan Berkelanjutan
4	Pelaksanaan Kebijakan Dan Kegiatan Teknis Urusan Pengembangan Dan Perbenihan	Kelompok Penangkar Benih. Poktan/Gapoktan

2.1.5 Mitra Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan pelayanan Dinas Perkebunan bermitra dengan beberapa pihak, baik unsur pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, maupun unsur non pemerintah. Adapun mitra Dinas Perkebunan adalah sebagai berikut.

- a. Perangkat Daerah di Kabupaten Kutai Kartanegara: Dinas Pertanian dan Peternakan (termasuk Balai Penyuluh Pertanian/BPP), Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu, dan Kecamatan.
- b. Apkasindo.
- c. Koperasi Perkebunan.
- d. Penangkar Benih.
- e. Kontak Tani dan Nelayan Andalan.
- f. Perusahaan Besar Swasta (PBS).
- g. Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI).
- h. LSM, CFOR dan GIZ.

2.1.6 Dukungan BUMD dalam pencapaian Kinerja Perangkat Daerah

Dalam rangka peningkatan produktivitas kelapa sawit, Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara bekerjasama dengan Badan Usahan Milik Daerah (BUMD) yaitu PT. Kukar Sejahtera Dambar Etam (Perseroda), telah mendukung pengelolaan Kebun Kelapa Sawit milik Dinas Perkebunan untuk menghasilkan Pendapatan Asli Daerah.

2.2 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PERKEBUNAN

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan adalah pernyataan yang disimpulkan dari kesenjangan antara realita/capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia. Permasalahan akan diuraikan untuk mengetahui faktor internal maupun eksternal, yang menjadi pendorong munculnya permasalahan tersebut. Identifikasi permasalahan dari hasil capaian kinerja pembangunan perkebunan pada periode lima tahun sebelumnya disebabkan oleh “Belum optimalnya produksi komoditi perkebunan”. Permasalahan pokok tersebut disebabkan oleh :

1. Masih Rendahnya minat masyarakat dan petani dalam budidaya tanaman perkebunan, antara lain: kopi, aren, dan kakao.

Rendahnya minat masyarakat dan petani dalam budidaya tanaman perkebunan menggambarkan kondisi di mana sebagian besar pelaku usaha tani belum menjadikan komoditas perkebunan kopi, aren, dan kakao sebagai pilihan utama atau menarik untuk dikembangkan. Sebagian petani lebih memilih komoditas pertanian jangka pendek yang dianggap lebih cepat memberikan hasil dan lebih mudah dipasarkan. Akibatnya, masyarakat cenderung enggan memulai atau mengembangkan usaha perkebunan secara lebih serius. Situasi ini biasanya muncul karena beberapa alasan, yaitu :

- 1) Masih terbatasnya pemahaman mengenai nilai ekonomi komoditas perkebunan khususnya
- 2) Rendahnya akses terhadap teknologi dan inovasi budidaya yang lebih produktif.
- 3) Minimnya jaminan pasar yang dianggap tidak stabil.
- 4) Fluktuasi harga komoditas Kopi, aren dan kakao tidak stabil.
- 5) Minimnya regenerasi pekebun.

2. Belum optimalnya pemanfaatan lahan oleh perusahaan perkebunan.
disebabkan oleh beberapa akar masalah yaitu :
 - 1) Adanya lahan yang tumpang tindih dengan peruntukkan usaha lainnya.
 - 2) Kurangnya ketaatan perusahaan perkebunan dalam melaksanakan ketentuan yang terdapat dalam perizinan berusaha.
 - 3) Terdapat bagian dari lahan yang diberikan izin usaha perkebunan kondisinya tidak dapat diusahakan.
 - 4) Masih banyak terjadi permasalahan usaha perkebunan.

3. Belum Optimalnya Produktivitas Komoditas Perkebunan.

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja pada subbab di atas, dimana produktivitas 7 (tujuh) komoditi perkebunan secara umum mengalami fluktuatif. Sebagai contoh, komoditi kelapa sawit potensi produktivitasnya bisa mencapai 25 ton/ha hingga 35 ton/ha, namun hasil produktivitas kelapa sawit tahun 2022 s/d 2024 antara 12 sampai 16 ton/ha. Apabila dibandingkan dengan produktivitas Kelapa Sawit Provinsi Kalimantan Timur 18-20 ton/ha, maka produktivitas kelapa sawit Kabupaten Kutai Kartanegara lebih rendah.

Potensi produktivitas komoditi Karet pada tahun 2022 s/d 2024 rata-rata sebesar 1.079 Kg/Ha, lebih rendah dibanding produktivitas komoditi karet Provinsi Kalimantan Timur sebesar 1.398 Kg/Ha. Rendahnya produktivitas tersebut akibat dari harga lump ditingkat pekebun tidak menguntungkan, sehingga ada beberapa pekebun tidak panen. Terdapat 4 (empat) kecamatan sentra komoditi Karet menunjukkan tingkat produktivitasnya cukup baik, yaitu Marang Kayu, Muara Badak, Muara Muntai dan Loa Janan mencapai 1.200 – 1.350 Kg/Ha (lump).

Tahun 2022 s/d 2024 produktivitas komoditi Lada lebih tinggi dari rata-rata potensi produktivitas Kaltim yang mencapai 884 Kg/Ha, namun masih rendah apabila dibanding dengan Potensi Produktivitas yang memiliki standar sebesar 2.000 Kg/Ha. Hal ini disebabkan oleh menurunnya luas tanam sehingga produksi dan produktivitas lada di Kabupaten Kutai Kartanegara menurun, khususnya di kecamatan Loa Janan sebagai sentra tanaman Lada.

Produktivitas Komoditi Kelapa, Kopi dan Kakao di Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2022 s/d 2024 lebih tinggi dari rata-rata potensi produktivitas Kaltim, namun masih rendah dari standar potensi. Hal ini

disebabkan oleh luas lahan tanaman tua dan atau rusak komoditi Kelapa masih tinggi, masih rendahnya luas tanam komoditi Kopi dan Kakao di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Produktivitas Aren Dalam Kutai Kartanegara pada tahun 2022 s/d 2024 lebih rendah dari rata-rata standar potensinya yang bisa mencapai 30.000 kg/ha. Rendahnya Produktivitas komoditi ini disebabkan oleh kurangnya luas tanaman menghasilkan. Namun produktivitas aren di Kabupaten Kutai Kartanegara masih lebih tinggi dibanding rata-rata produktivitas Aren di tingkat Provinsi Kalimantan Timur mencapai 1.129 kg/ha.

Permasalahan “Produktivitas tanaman perkebunan masih rendah” dipicu oleh beberapa faktor yang menjadi akar masalah, yaitu:

- 1) Sebagian besar tanamannya sudah tua dan rusak.
 - 2) Teknik budidaya masih belum sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Agriculture Practices* (GAP), terutama pada kebun rakyat.
 - 3) Gangguan serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT).
 - 4) Belum memadainya prasarana pendukung budidaya, seperti pintu air dan saluran pada areal kebun Kelapa.
 - 5) Masih kurang tersedianya sarana produksi, sesuai dengan kebutuhan tanaman.
 - 6) Masih kurangnya penyuluhan dan pendampingan oleh tenaga penyuluh pertanian, POPT dan tenaga teknis perkebunan lainnya.
4. Alih Fungsi Lahan Perkebunan dan Perubahan Rencana Tata Ruang

Alih fungsi lahan perkebunan menjadi penggunaan non-pertanian atau peralihan komoditi sesama komoditas perkebunan memiliki kaitan yang erat dengan tata ruang perkebunan. Hubungan ini pada dasarnya adalah saling terkait antara kebutuhan ekonomi jangka pendek dan jangka panjang. Peralihan fungsi lahan perkebunan ini dipicu beberapa akar permasalahan diantaranya :

- 1) Fluktuasi harga yang tidak stabil untuk produk perkebunan dapat membuat petani beralih ke tanaman lain atau mengalihfungsikan lahan mereka karena tidak lagi menguntungkan.
- 2) Akibat kenaikan biaya usaha tani atau kebutuhan akan modal usaha yang mendesak.
- 3) Peningkatan jumlah penduduk menciptakan tuntutan yang lebih besar terhadap lahan untuk perumahan, lapangan kerja, dan kebutuhan publik lainnya yang sering kali terwujud melalui alih fungsi lahan.

- 4) Kebijakan pemerintah, baik pusat maupun daerah terkait rencana perubahan tata ruang dan penggunaan lahan dapat memengaruhi keputusan tentang pengalihan fungsi lahan perkebunan, baik yang mendukung maupun menghambat.
5. Potensi Terjadinya Kerugian Perkebunan (Gangguan Organisme Pengganggu Tanaman dan Kebakaran Lahan Perkebunan).

Gangguan organisme pengganggu tanaman dan terjadinya kebakaran lahan perkebunan masih merupakan risiko yang cukup besar yang dialami dalam usaha perkebunan. Gangguan OPT merupakan ancaman yang dapat menyebabkan kerugian yang cukup besar secara bertahap atau mendadak melalui serangan epidemi. Sedangkan kebakaran lahan perkebunan merupakan bencana perkebunan yang bisa disebabkan oleh alam maupun manusia. Dimana Risiko ini tidak hanya mencakup areal yang dimiliki pekebun namun juga risiko dampak yang lebih luas karena adanya potensi kebakaran yang merambah keluar batas wilayah Perkebunan. Potensi terjadinya gangguan organisme pengganggu tanaman dan kebakaran lahan perkebunan disebabkan beberapa hal diantaranya :

- 1) Penggunaan pupuk kimia secara berlebihan dan tidak seimbang, serta rendahnya kandungan bahan organik tanah.
- 2) Ketergantungan pada pestisida kimiawi sebagai solusi pertama dan utama untuk mengendalikan OPT.
- 3) Adanya pembukaan lahan perkebunan dengan cara dibakar.
- 4) Fenomena iklim seperti *El Nino* yang terjadi di musim kemarau panjang.
- 5) Masih lemahnya regulasi dan implementasi penegakan hukum.

Dari beberapa pemaparan di atas, maka permasalahan yang dihadapi Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029 dapat dilihat dalam tabel pemetaan permasalahan sebagai berikut :

Tabel 2.16 Pemetaan Permasalahan Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029.

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya produksi komoditi perkebunan	Rendahnya minat masyarakat dan petani dalam budidaya tanaman perkebunan, antara lain: kopi, aren, dan kakao	a. Masih terbatasnya pemahaman mengenai nilai ekonomi komoditas perkebunan. b. Rendahnya akses terhadap teknologi dan inovasi budidaya yang lebih produktif. c. Minimnya jaminan pasar yang dianggap tidak stabil. d. Fluktuasi harga komododitas Kopi, aren dan kakao tidak stabil e. Minimnya regenerasi pekebun
	Belum optimalnya pemanfaatan lahan oleh perusahaan perkebunan	a. Adanya lahan yang tumpang tindih dengan peruntukkan usaha lainnya. b. Kurangnya ketaatan perusahaan perkebunan dalam melaksanakan ketentuan yang terdapat dalam perizinan berusaha. c. Terdapat bagian dari lahan yang diberikan izin usaha perkebunan kondisinya tidak dapat diusahakan. Masih banyak terjadi permasalahan usaha perkebunan.
	Belum Optimalnya Produktivitas Komoditas Perkebunan	a. Sebagian besar tanamannya sudah tua dan rusak. b. Teknik budidaya masih belum sesuai dengan prinsip-prinsip <i>Good Agriculture Practices</i> (GAP), terutama pada kebun rakyat. c. Gangguan serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT). d. Belum memadainya prasarana pendukung budidaya. seperti pintu air dan saluran pada areal kebun Kelapa. e. Masih kurang tersedianya sarana produksi. sesuai dengan kebutuhan tanaman. f. Masih kurangnya penyuluhan dan pendampingan oleh tenaga penyuluh pertanian, POPT dan tenaga teknis perkebunan lainnya.
	Alih Fungsi Lahan Perkebunan dan Perubahan Rencana Tata Ruang	a. Fluktuasi harga yang tidak stabil untuk produk perkebunan dapat membuat petani beralih ke tanaman lain atau mengalihfungsikan lahan mereka karena tidak lagi menguntungkan.

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		b. Akibat Kenaikan biaya usaha tani atau kebutuhan akan modal usaha yang mendesak. c. Peningkatan jumlah penduduk menciptakan tuntutan yang lebih besar terhadap lahan untuk perumahan, lapangan kerja, dan kebutuhan publik lainnya. yang sering kali terwujud melalui alih fungsi lahan. d. Kebijakan pemerintah, baik pusat maupun daerah, terkait tata ruang dan penggunaan lahan dapat mempengaruhi keputusan tentang pengalihan fungsi lahan perkebunan, baik yang mendukung maupun menghambat.
	Potensi Terjadinya Kerugian Perkebunan (Gangguan Organisme Pengganggu Tanaman dan Kebakaran Lahan Perkebunan)	a. Penggunaan pupuk kimia secara berlebihan dan tidak seimbang, serta rendahnya kandungan bahan organik tanah. b. Ketergantungan pada pestisida kimiawi sebagai solusi pertama dan utama untuk mengendalikan OPT. c. Adanya pembukaan lahan perkebunan dengan cara dibakar. d. Fenomena Iklim seperti <i>El Nino</i> yang terjadi di musim kemarau panjang. e. Masih lemahnya regulasi dan implementasi penegakan hukum.

Sumber: hasil analisis, 2024

2.2.2 Isu Strategis

Isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan perangkat daerah karena dampaknya dapat mempengaruhi daerah baik secara langsung ataupun tidak langsung secara signifikan dimasa datang. Bertitik tolak dari permasalahan utama di sektor perkebunan yang telah diuraikan di atas, diidentifikasi potensi, isu KLHS RPJMD, dinamika isu di tingkat global, isu nasional, isu regional, dan isu Kabupaten maka dirumuskan isu-isu strategis pembangunan perkebunan dalam periode 2025-2029. Penyajian isu strategis dimuat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.17 Teknis Menyimpulkan Isu Strategis Dinas Perkebunan

Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS Yang Relevan Dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan PD				Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	Kabupaten Kukar	
1.Tersedianya komoditas Utama Sub Sektor Perkebunan (kelapa sawit, karet, lada, kelapa dalam, kakao, kopi, aren)	1. Produksi komoditas perkebunan belum optimal	1.Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat dan UMKM	1. Geopolitik dan Geoekonomi	1.Resiliensi dan prospek perekonomian yang positif	1. Kemandirian Pangan.	1. Pengembangan ekonomi berkelanjutan berbasis sektor ekonomi non ekstraktif.	Peningkatan Produktivitas Komoditas Perkebunan.
	2. Rendahnya minat masyarakat dan petani dalam budidaya tanaman perkebunan, antara lain: kopi, aren, dan kakao	2. Peningkatan Kesempatan Kerja	2. Industri 5.0			2. Penguatan Ketahanan Pangan Dalam Mendukung Swasembada Pangan Nasional	
2. Tersediannya sumber daya alam komoditas perkebunan yang menjadi basis pengembangan hilirisasi industri	3. Belum Optimalnya Produktivitas Komoditas Perkebunan	3. Ketahanan Pangan Sebagai Daerah Mitra IKN		2. Rendahnya Produktivitas	2. Peluang pembangunan superhub Ekonomi dan mitra IKN	3. Akselerasi Pembangunan Kutai Kartanegara Sebagai Penyangga IKN	
3. Cukupnya ketersediaan pangan dan energi hijau di Kukar untuk pemenuhan kebutuhan Ibu Kota Nusantara (IKN)	4. Alih fungsi lahan perkebunan dan perubahan rencana tata ruang						

Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS Yang Relevan Dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan PD				Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	Kabupaten Kukar	
4. Masih tingginya potensi peningkatan produksi tanaman perkebunan	5. Belum optimalnya pemanfaatan lahan oleh perusahaan perkebunan						
5. Ketersediaan lahan yang masih memadai		4. Rehabilitasi Lahan Kritis dan Penanganan Satwa Liar	3. Dampak Perubahan Iklim Global	3. Keanekaragaman Hayati dan Potensi Lingkungan	3. Kualitas Lingkungan Hidup dan Penurunan Emisi GRK	4. Pelestarian lingkungan hidup berkelanjutan dan optimalisasi tanggap bencana	
6. Masih cukup banyak komoditi yang berusia muda dan berpotensi untuk dikembangkan kedepan	6. Potensi Terjadinya Kerugian Perkebunan (Gangguan Organisme Pengganggu Tanaman dan Kebakaran Lahan Perkebunan)	5. Pencegahan dan penanggulangan bencana alam (Banjir. Kebakaran hutan dan lahan, tanah longsor					

Sumber: hasil analisis, 2025

Bertitik tolak dari identifikasi berbagai aspek baik internal maupun eksternal sebagaimana telah diuraikan di atas, dirumuskan isu strategis dan mendasar dalam pembangunan perkebunan yang harus tertangani dalam periode 2025-2029 yaitu : “Peningkatan Produktivitas Komoditas Perkebunan”.

Peningkatan produktivitas perkebunan dilakukan melalui pengembangan dan intensifikasi tanaman perkebunan yang dititikberatkan pada komoditas unggulan dan andalan berbasis kawasan secara terintegrasi. Hal ini dilakukan mulai dari pemberian kepastian ketersediaan lahan, penyiapan petani unggul dan dukungan sarana, prasarana dan infrastuktur wilayah. Komoditi yang menjadi komoditi unggulan perkebunan adalah kelapa sawit, karet, lada, dan kelapa dalam. Sedangkan komoditi andalan perkebunan adalah kopi, kakao, dan aren. Disamping itu juga melakukan peningkatan perlindungan tanaman dan penanggulangan bencana serta gangguan usaha perkebunan.

Dalam mendukung percepatan peningkatan produktivitas perkebunan khususnya perkebunan rakyat diperlukan dukungan ketersediaan prasarana yang memadai, antara lain jalan produksi dan jaringan irigasi usaha tani, pintu parit kebun serta bangunan pendukung pengolahan hasil perkebunan. Kondisi jalan produksi pada kawasan dan sentra perkebunan yang saat ini secara umum belum memadai diharapkan dapat lebih ditingkatkan. Dengan demikian mobilisasi orang dan barang dari/menuju sentra produksi dapat lebih lancar yang pada akhirnya dapat berdampak meningkatnya produksi.

Optimalisasi pemanfaatan lahan perkebunan di Kabupaten Kutai Kartanegara dilakukan melalui peningkatan pengawasan dan pembinaan bagi perusahaan perkebunan yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara. Dengan demikian diharapkan akan terjadi peningkatan luas kebun inti dan plasma dari luas lahan IUP yang telah diterbitkan di Kabupaten Kutai Kartanegara seluas 407.870,91 Ha.

Penguatan kelembagaan, kemitraan, dan peningkatan mutu serta nilai tambah produk perkebunan dilakukan melalui penguatan penyuluhan perkebunan dalam melakukan pendampingan kepada pekebun dan pengembangan pekebun milenial. Selain itu, dilakukan juga pengembangan

kemitraan usaha perkebunan dan pengolahan hasil perkebunan serta melalui kegiatan Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian. Melalui kegiatan tersebut, diharapkan menjadi platform yang komprehensif untuk mempromosikan, mengedukasi, memfasilitasi transaksi bisnis, dan mendorong investasi serta inovasi di seluruh rantai nilai sektor perkebunan.

Isu strategis yang telah diuraikan di atas memiliki arti penting dalam rangka meningkatkan produksi dan nilai jual hasil perkebunan di Kabupaten Kutai Kartanegara sehingga bisa mendorong laju pertumbuhan subsektor perkebunan. Isu strategis tersebut menjadi titik tolak dalam merumuskan tujuan dan sasaran pembangunan perkebunan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 TUJUAN RENSTRA DINAS PERKEBUNAN TAHUN 2025-2029

Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan yang dirumuskan merupakan gambaran tentang keadaan yang diinginkan oleh Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara selama kurun waktu lima tahun ke depan. Tujuan disusun berdasarkan analisis permasalahan yang dihadapi dan isu yang berkembang yang harus direspon serta mempertimbangkan peran langsung subsektor perkebunan untuk mendukung pencapaian sasaran RPJMD.

Visi RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara 2025-2029 adalah : Terwujudnya Fondasi Pusat Pangan, Pariwisata dan Industri Hijau yang Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan. Berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Perkebunan, maka secara langsung mendukung pencapaian Misi Kedua RPJMD yaitu : Terbaik Dalam Mewujudkan Pengembangan Hilirisasi Sektor Pertanian, Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Sebagai Pondasi Ekonomi Baru Non Ekstraktif. Selanjutnya, Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara mendukung terwujudnya tujuan 1 RPJMD yaitu “Meningkatnya Fondasi Perekonomian yang Maju, Terintegrasi dan Berkelanjutan” dan Sasaran 1.1. “Meningkatnya Pembangunan Ekonomi Sektor Unggulan Daerah”.

Berdasarkan tugas dan fungsi serta keselarasan dengan tujuan dan sasaran RPJMD, maka ditetapkanlah tujuan RENSTRA Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029, yaitu : “Meningkatnya Daya Saing Sub Sektor Perkebunan”. Tujuan tersebut diukur dengan indikator : Persentase Pertumbuhan Nilai Produksi Sub Sektor Perkebunan.

Peningkatan daya saing sektor perkebunan di Kabupaten Kutai Kartanegara bertumpu pada penguatan produktivitas, efisiensi usaha, dan kualitas komoditas unggulan. Hal ini mencakup pemanfaatan teknologi budidaya yang lebih modern, perbaikan manajemen usaha tani, pengembangan sarana prasarana produksi, serta peningkatan kapasitas SDM petani. Konsep daya saing juga menekankan pentingnya standardisasi mutu, sertifikasi lahan dan produk, serta penerapan praktik ramah lingkungan, sehingga komoditas perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara mampu bersaing di pasar regional dan nasional.

Pertumbuhan nilai produksi mencerminkan kenaikan volume, kualitas,

dan efisiensi produksi komoditas unggulan seperti kelapa sawit, karet, kopi, kelapa dalam, lada, kakao, dan aren yang menjadi basis perekonomian wilayah perdesaan di Kutai Kartanegara. Hal ini menunjukkan bahwa komoditas perkebunan Kukar semakin kompetitif, baik di pasar domestik maupun global, kondisi ini menjadi bukti nyata keberhasilan strategi peningkatan daya saing. Tujuan ini menekankan bahwa produktivitas tidak hanya sebatas peningkatan volume hasil, tetapi juga menyangkut kualitas, keberlanjutan, konsistensi produksi, dan kemampuan petani mengoptimalkan faktor produksi seperti bibit unggul, pupuk tepat guna, serta pengendalian hama terpadu. Dengan peningkatan produktivitas, sektor perkebunan menjadi lebih kompetitif, mampu menopang pertumbuhan ekonomi lokal, dan membuka peluang bagi peningkatan pendapatan masyarakat.

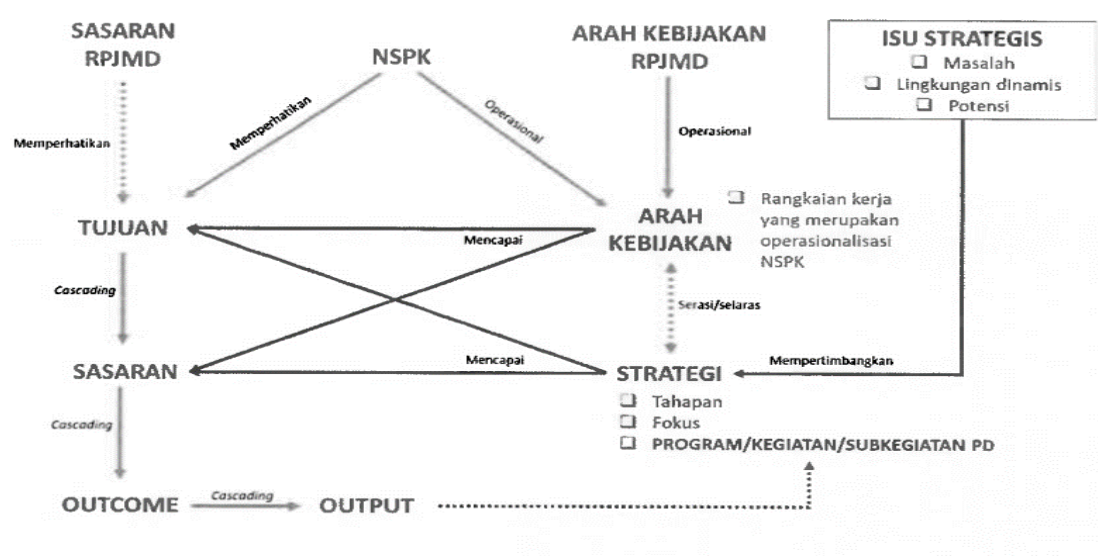
Selain itu, peningkatan produksi dan produktivitas tidak dapat dipisahkan dari aspek keberlanjutan dan adaptasi terhadap isu perubahan iklim. Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki wilayah perkebunan yang cukup luas, termasuk sawit, karet, dan komoditas rakyat lainnya, sehingga pendekatan produktivitas harus diiringi pengelolaan lingkungan yang bertanggungjawab.

3.2 SASARAN RENSTRA DINAS PERKEBUNAN TAHUN 2025-2029

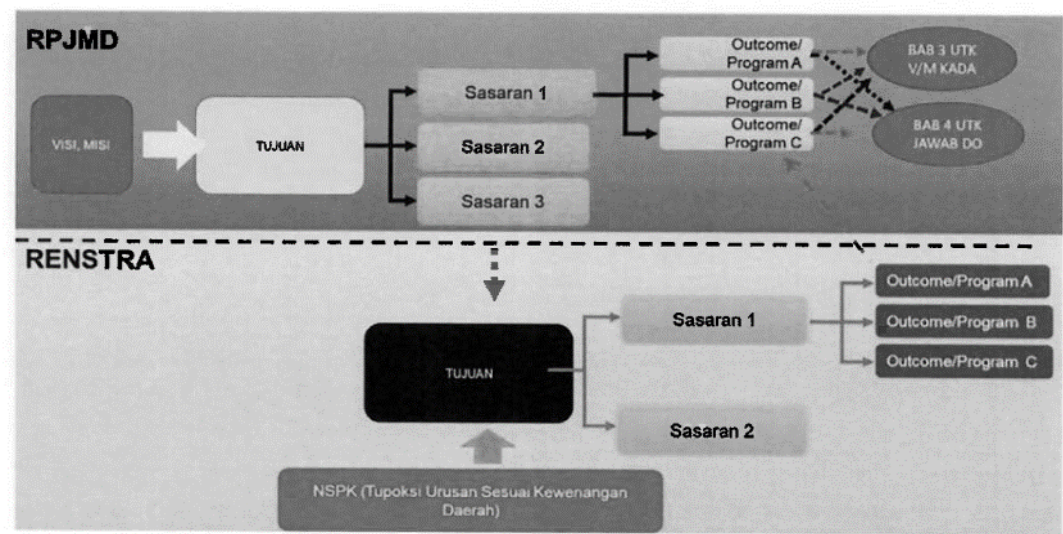
Tujuan RENSTRA Dinas Perkebunan diturunkan ke Sasaran yang terukur. Sasaran RENSTRA Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kinerja yang dapat berupa tahapan dan fokus atau aspek prioritas menuju terwujudnya pencapaian tujuan RENSTRA Perangkat Daerah. Sasaran RENSTRA Dinas Perkebunan Tahun 2025-2029 adalah: Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Komoditas Perkebunan dengan indikator : 1. *Persentase Pertumbuhan Produksi Komoditas Perkebunan*; dan 2. *Rata-Rata Produktivitas Komoditas Perkebunan*. Meningkatnya produksi dan produktivitas komoditas perkebunan di Kutai Kartanegara mencerminkan upaya sistematis untuk meningkatkan hasil panen dan efisiensi usaha tani.

Konsep dan kerangka keterkaitan sasaran RPJMD dengan RENSTRA Dinas Perkebunan dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

Gambar 3.1. Konsep RENSTRA Dinas Perkebunan



Gambar 3.2 Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD Dengan Tujuan RENSTRA Dinas Perkebunan



Selanjutnya, tujuan, sasaran, indikator tujuan dan sasaran, serta target kinerja Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029

NO	NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	DATA AWAL	TARGET KINERJA TAHUN					
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	NSPK: 1. Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. Sasaran RPJMD: Sasaran 1.1. Meningkatnya Pembangunan Ekonomi Sektor Unggulan Daerah	Meningkatnya Daya Saing Sub Sektor Perkebunan		Persentase Pertumbuhan Nilai Produksi Sub Sektor Perkebunan	5,54%	5,77%	5,79%	5,91%	5,95%	5,98%	6,01%
			Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Komoditas Perkebunan*	Persentase Pertumbuhan Produksi Komoditas Perkebunan	5,97%	5,98%	6,07%	6,11%	6,13%	6,16%	6,18%
				Rata-Rata Produktivitas Komoditas Perkebunan	4,48 Ton/Ha	4,58 Ton/Ha	4,65 Ton/Ha	4,74 Ton/Ha	4,82 Ton/Ha	4,89 Ton/Ha	4,97 Ton/Ha

Sumber: hasil analisis dan proyeksi, 2025

Keterangan:

*) Komoditi Kelapa Sawit. Karet. Kelapa Dalam. Lada. Aren. Kopi. Kakao.

Sumber: Hasil analisis Dinas Perkebunan Kab. Kutai Kartanegara Analisis. 2025

3.3 STRATEGI DINAS PERKEBUNAN DALAM MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA PD TAHUN 2025-2029

Perencanaan pembangunan Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029 merupakan keberlanjutan dari pembangunan tahun-tahun sebelumnya, sehingga dalam merumuskan strategi dan arah kebijakan pembangunan kedepan tidak lepas dari kondisi riil capaian pembangunan tahun sebelumnya.

Strategi RENSTRA Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan program/kegiatan/subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran RENSTRA Perangkat Daerah. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Strategi diperlukan untuk memperjelas arah dan tujuan pencapaian program atau implementasinya. Selain itu, strategi merupakan alat metode penghubung antara tujuan dan arah kebijakan organisasi sekaligus cara untuk mewujudkan sasaran dengan rancangan secara konseptual, analitis, realitas, rasional, dan komprehensif.

Dalam menentukan strategi, Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara harus mempertimbangkan berbagai faktor yang mempengaruhi pencapaian sasaran RENSTRA. Pendekatan yang digunakan adalah analisis SWOT (*Strenght-Weakness-Oportunity-Treat*). Kondisi umum Dinas Perkebunan dengan pelayanan publik dapat ditinjau sebagai berikut:

1. Kekuatan (*Strenght*) yang dimiliki :
 - a. Kualitas dan kuantitas SDM aparatur cukup memadai;
 - b. Ketersediaan anggaran dan fasilitas penunjang tupoksi cukup memadai;
 - c. Tersedianya lahan dan produksi dari Subsektor perkebunan;
 - d. Tersedianya komoditas Utama Sub Sektor Perkebunan (kelapa sawit, karet, lada, kelapa dalam, kakao, kopi, aren);
 - e. Tersediannya sumber daya alam komoditas perkebunan yang menjadi basis pengembangan hilirisasi industri;

- f. Ketersediaan pangan dan energi hijau untuk pemenuhan Ibu Kota Nusantara (IKN).

2. Kelemahan (*Weakness*) yang dimiliki :

- a. Produksi komoditas perkebunan belum optimal;
- b. Rendahnya nilai tambah produk perkebunan;
- c. Tidak adanya tenaga penyuluh khusus perkebunan di tingkat lapang;
- d. Alih fungsi lahan perkebunan dan tata ruang pembangunan;
- e. Data dan informasi perencanaan pembangunan perkebunan belum akurat;
- f. Meningkatnya tuntutan isu lingkungan dan kebutuhan energi baru terbarukan yang berbahan baku dari sub sektor perkebunan.

3. Peluang (*Oportunity*) yang dimiliki :

- a. Tersedianya kompetensi tenaga kerja Sub Sektor Perkebunan;
- b. Tingginya minat masyarakat terhadap komoditi perkebunan khususnya kelapa sawit;
- c. Kondusifnya iklim investasi dan peluang pasar terhadap produk perkebunan;
- d. Kemajuan teknologi pengolahan produk perkebunan;
- e. Selarasnya kebijakan antara pusat, provinsi dan kabupaten di bidang perkebunan;
- f. Penataan kelembagaan usaha kelompok tani pekebun.

4. Tantangan (*Treat*) yang dimiliki :

- a. Mewujudkan tiga pilar pertanian, yaitu Kemandirian pangan untuk 5 (lima) komoditas unggulan perkebunan (Kopi, Karet, lada, Kakao, Kelapa), kemudian kemandirian energi biodiesel dari komoditi sawit;
- b. Persaingan kualitas produk perkebunan;
- c. Implementasi tata ruang secara nasional belum terintegrasi, sehingga menimbulkan tumpang tindih peruntukan lahan;
- d. Perubahan cuaca/iklim sebagai imbas dari *global warning*.

Peran subsektor perkebunan dalam pembangunan ekonomi di Kabupaten Kutai Kartanegara dihadapkan pada permasalahan dan isu-isu yang berasal dari lingkungan internal dan eksternal serta global. Untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi didalam proses pembangunan perkebunan maka perlu dilakukan suatu analisis terhadap permasalahan serta isu strategis berdasarkan tugas pokok serta fungsi dari Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara.

Berdasarkan hasil analisis menggunakan kekuatan, kelemahan, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Perkebunan maka dihasilkan alternatif strategi. Adapun strategi yang ditetapkan untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

- 1. Meningkatkan produksi 7 (tujuh) komoditas prioritas perkebunan.
- 2. Meningkatkan perlindungan komoditas perkebunan.
- 3. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas tata kelola kawasan perkebunan.
- 4. Memperkuat pembinaan dan pendampingan kepada pekebun.
- 5. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing komoditas perkebunan.

Strategi diatas akan dilaksanakan secara bertahap. Penahapan pembangunan dimaksud adalah prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. Penahapan RENSTRA Dinas Perkebunan dapat disajikan seperti pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.2. Penahapan RENSTRA Dinas Perkebunan

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
Peningkatkan produksi dan produktivitas perkebunan	Pengembangan produksi dan produktivitas perkebunan	Penguatan produksi dan produktivitas perkebunan	Pemantapan produksi dan produktivitas perkebunan	Pemantapan Keberlanjutan produksi dan produktivitas perkebunan
STRATEGI:				
1. Meningkatkan produksi 7 (tujuh) komoditas prioritas perkebunan 2. Meningkatkan perlindungan komoditas perkebunan 3. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas tata kelola kawasan perkebunan 4. Memperkuat pembinaan dan pendampingan kepada pekebun 5. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing komoditas perkebunan				

3.4 ARAH KEBIJAKAN DINAS PERKEBUNAN DALAM MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA PD TAHUN 2025-2029

Arah Kebijakan RENSTRA Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi *NSPK* sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perkebunan dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran RENSTRA

Perangkat Daerah. Arah Kebijakan merupakan ketentuan yang telah ditetapkan untuk dijadikan pedoman dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan/subkegiatan guna terciptanya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran strategis serta pencapaian tujuan Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara, Adapun Teknik merumuskan kebijakan RENSTRA terdapat pada table berikut :

Tabel 3.3 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan RENSTRA

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan RENSTRA PD	Ket
1	NSPK: – Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan	– Penetapan kawasan strategis pembangunan (KEK, KPI, Kawasan Pangan, Perikanan, Perkotaan, Perdesaan) – Pengembangan kawasan sentra produksi dan distribusi pangan – Penguatan potensi usaha pertanian, Perikanan, UMKM, dan pariwisata – Penguatan agroindustri dan pariwisata lokal berbasis kearifan budaya – Hilirisasi hasil pertanian, perikanan, dan budaya menjadi produk bernilai tambah – Peningkatan ekspor hasil olahan pangan, perikanan, dan kreatif – Transformasi menuju ekonomi rendah karbon	– Pengembangan komoditas prioritas perkebunan – Intensifikasi tanaman perkebunan yang dititikberatkan pada komoditas prioritas secara terintegrasi, mulai dari kepastian ketersediaan lahan, penyiapan petani unggul dan dukungan sarana dan prasarana. – Peningkatan perlindungan tanaman serta penanggulangan bencana dan gangguan usaha perkebunan – Peningkatan Pengawasan dan Pembinaan usaha perkebunan – Peningkatan pendampingan kelembagaan dan pekebun secara inklusif – Peningkatan kelembagaan usaha perkebunan swadaya yang produktif dan sehat dengan melibatkan stakeholder termasuk perempuan dan kelompok rentan	

Sumber: hasil analisis 2025

Dinas Perkebunan mendorong pembangunan perkebunan yang lebih adil, berkelanjutan, dan mampu memberikan manfaat nyata bagi seluruh lapisan masyarakat di Kutai Kartanegara. Dalam pelaksanaan strategi dan arah kebijakan pembangunan perkebunan, prinsip kesetaraan gender dan inklusi sosial diterapkan melalui penyediaan layanan yang responsif dan setara seperti fasilitasi peningkatan kapasitas pekebun dengan memperhatikan kebutuhan perempuan dan kelompok rentan, memastikan partisipasi berimbang dalam pelatihan, serta menyediakan informasi yang mudah diakses oleh berbagai kelompok masyarakat.

Pelaksanaan strategi dan arah kebijakan tersebut di atas dapat efektif dilakukan apabila ada sinergi dan kolaborasi dari berbagai stakeholder. Oleh karena itu diseminasi dan sosialisasi strategi dan arah kebijakan ini akan dilakukan secara terus menerus agar dapat dipahami yang pada akhirnya adanya partisipasi aktif masyarakat luas dalam pencapaian pelaksanaan program/kegiatan/subkegiatan yang secara langsung didesain untuk mencapai tujuan.

Keterkaitan tujuan, sasaran, dan arah kebijakan outcome dan output serta penentuan program/kegiatan/subkegiatan Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.4 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan RENSTRA Dinas Perkebunan

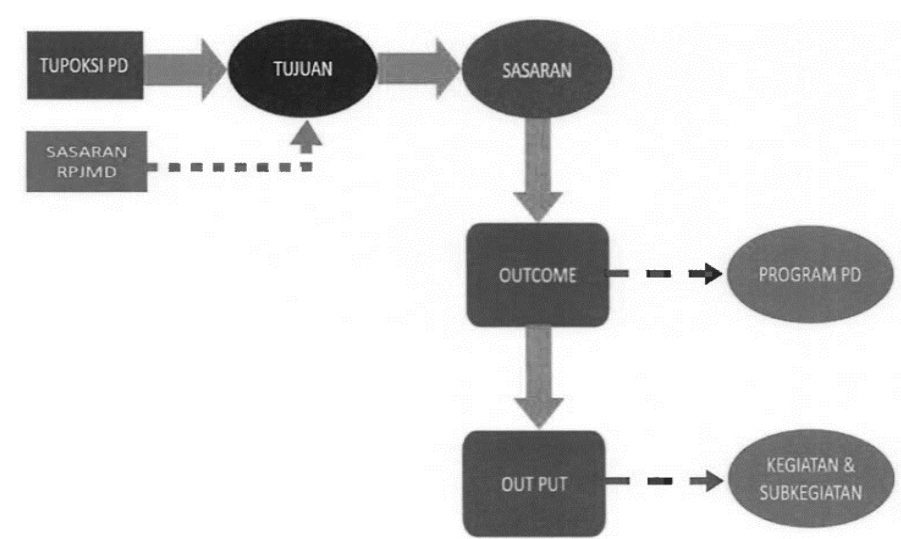
	Visi: Terwujudnya Fondasi Pusat Pangan. Pariwisata dan Industri Hijau yang Maju. Sejahtera dan Berkelanjutan								
	Misi II: Terbaik Dalam Mewujudkan Pengembangan Hilirisasi Sektor Pertanian. Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Sebagai Pondasi Ekonomi Baru Non Ekstraktif								
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Meningkatnya Daya Saing Sektor Perkebunan	Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Komoditas Perkebunan	Meningkatkan produksi 7 (tujuh) komoditas prioritas perkebunan	1. Pengembangan komoditas prioritas perkebunan	√	√	√	√	√	√
			2. Intensifikasi tanaman perkebunan yang dititikberatkan pada komoditas prioritas secara terintegrasi, mulai dari kepastian ketersediaan lahan, penyiapan petani unggul dan dukungan sarana dan prasarana.	√	√	√	√	√	√
		Meningkatkan perlindungan komoditas Perkebunan	Peningkatan perlindungan tanaman serta penanggulangan bencana dan gangguan usaha perkebunan	√	√	√	√	√	√
		Meningkatkan efisiensi dan efektivitas tata kelola kawasan perkebunan.	Peningkatan Pengawasan dan Pembinaan usaha perkebunan	√	√	√	√	√	√
		Memperkuat Pembinaan dan pendampingan kepada pekebun.	Peningkatan pendampingan kelembagaan dan pekebun	√	√	√	√	√	√
		Meningkatkan nilai tambah dan daya saing komoditas Perkebunan	Peningkatan kelembagaan usaha perkebunan swadaya yang produktif dan sehat dengan stakeholder	√	√	√	√	√	√

Sumber: Hasil Analisis, 2025

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam rangka mendukung keberhasilan perwujudan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, dan berdasarkan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan pada Rencana Strategis Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara, maka disusun program, kegiatan, Subkegiatan, indikator kinerja, serta target dan pagu indikatif dan pendanaan indikatif. Pada subbab ini dimuat rencana program, kegiatan, dan subkegiatan yang diturunkan secara cascading dari tujuan dan sasaran RENSTRA Dinas Perkebunan. Kerangka perumusan program, kegiatan, dan subkegiatan diilustrasikan pada gambar di bawah.

Gambar 4.1 Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan RENSTRA Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara



4.1. URAIAN PROGRAM

Program dan kegiatan pemerintah daerah dalam spesifikasi subsektoral perkebunan merupakan upaya Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara dalam mengatasi permasalahan dan mengantisipasi isu-isu strategi yang berkembang, untuk pencapaian tujuan dan sasaran RENSTRA maupun pembangunan jangka menengah Kabupaten Kutai Kartanegara. Terdapat dua jenis program dalam pelaksanaan pembangunan yakni program strategis yang merupakan bentuk program atau kegiatan yang merujuk langsung pada sasaran RENSTRA dan program operasional yang dalam penjabarannya tidak dikaitkan secara langsung dengan RENSTRA Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara. Meskipun begitu, keseluruhan program dan kegiatan dalam pengembangan subsektor perkebunan harus

diturunkan lebih lanjut ke dalam indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

Program merupakan suatu operasionalisasi dari strategi atau kebijakan pemerintah daerah yang terdiri dari satu atau lebih kegiatan dengan cakupan teknis lebih mendalam dan dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau masyarakat. Dalam pelaksanaannya, setiap program harus dikoordinasikan oleh pemerintah daerah agar selalu berada dalam satu koridor pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah secara global, dalam hal ini sasaran RENSTRA Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara.

Program pembangunan subsektor perkebunan merupakan pelaksanaan dari strategi RENSTRA Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara. Rumusan kebijakan yang tepat akan melahirkan program-program maupun kegiatan-kegiatan yang mampu menjawab tantangan pemerintah daerah ke depan sehingga setiap permasalahan dapat diatasi dan isu-isu strategis akan menjadi daya dorong akselerasi pencapaian pembangunan daerah. Setiap program dalam merealisasikan strategi pembangunan memiliki fungsi dan karakter yang berbeda. Meskipun begitu, masing-masing program tersebut akan memiliki muara yang sama yakni terwujudnya tujuan dan sasaran Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai lembaga yang dipercaya Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam pengelolaan subsektor perkebunan.

Berdasarkan strategi dan kebijakan untuk mencapai sasaran RENSTRA Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029, maka dirumuskan program-program prioritas beserta kegiatan untuk masing-masing program sesuai amanat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
2. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian.
3. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian.
4. Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian.
5. Program Perizinan Usaha Pertanian.
6. Program Penyuluhan Pertanian.

4.2. URAIAN KEGIATAN

Kegiatan merupakan rangkaian aktivitas pembangunan yang dijalankan oleh Perangkat Daerah dalam rangka menghasilkan keluaran (output) yang mendukung pencapaian hasil (outcome) dari suatu program. Adapun kegiatan Dinas Perkebunan untuk periode 2025-2029, meliputi :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. dengan kegiatan:
 - 1.1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
 - 1.2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
 - 1.3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah.
 - 1.4. Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah.
 - 1.5. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.
 - 1.6. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.
 - 1.7. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
 - 1.8. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
 - 1.9. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
2. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian, dengan kegiatan :
 - 2.1. Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian
 - 2.2. Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota.
3. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian, dengan kegiatan :
 - 3.1. Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian.
 - 3.2. Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian.
4. Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian, dengan kegiatan :
 - 4.1. Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota.
5. Program Perizinan Usaha Pertanian, dengan kegiatan :
 - 5.1. Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota.

6. Program Penyuluhan Pertanian, dengan kegiatan :

6.1. Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian.

4.3. URAIAN SUBKEGIATAN

Subkegiatan merupakan bentuk operasional dari pelaksanaan aktivitas atau layanan dalam suatu kegiatan, yang dijalankan untuk melaksanakan kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk lebih jelasnya, secara lengkap Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan RENSTRA Perangkat Daerah dapat dilihat pada Tabel berikut ini

Tabel 4.2 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan RENSTRA Dinas Perkebunan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
NSPK: 1. Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan	Meningkatnya Daya Saing Sub Sektor Perkebunan				Persentase Pertumbuhan Nilai Produksi Sub Sektor Perkebunan		
Sasaran RPJMD: Sasaran 1.1. Meningkatnya Pembanguna Ekonomi Sektor Unggulan Daerah		Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Komoditas Perkebunan			Persentase Pertumbuhan Produksi Komoditas Perkebunan		
					Rata -Rata Produktivitas Komoditas Perkebunan		
			Meningkatnya Akuntabilitas Dan Tatakelola Kinerja		Nilai Sakip Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Perangkat Daerah yang Efektif dan Efisien				
				Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
				Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	
				Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Tersediannya Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Akuntabel	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Akuntabel	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
				Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan an/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/ Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan an / Semesteran SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				an/Semesteran SKPD			
				Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	
				Tersediannya Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
				Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	
				Tersedianya Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	
				Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang milik Daerah pada SKPD	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Daerah pada SKPD			
				Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Administrasi Pendapatan Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	
				Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	
				Tersediannya Dokumen Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Kepegawaian Perangkat Daerah	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
				Tersedianya Pakaian Dinas	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				beserta Atribut Kelengkapan			
				Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
				Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang Yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
				Terlaksananya Layananan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Layananan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
				Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
				Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Yang disediakan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan PenyelenggaraanRapat Koordinasi dan KonsultasiSKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
				Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang Diadakan	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
				Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
				Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Pengadaan Mebel	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Tersediannya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disediakan	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang diSediakan	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Tersedianya Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	
				Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Ketentuan	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Operasional atau Lapangan			
				Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
			Meningkatnya produksi komoditas perkebunan yang didukung sarana berkualitas dan merata		Produksi Komoditas Perkebunan	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Meningkatnya Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Standar	Jumlah Sarana Pendukung Pertanian Yang Diawasi	Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	
				Terlaksananya Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	
				Meningkatnya Pemanfaatan SDG Tanaman Perkebunan	Jumlah Sumber Daya Genetik (SDG) Tanaman Perkebunan yang dimanfaatkan	Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Termanfaatkannya SDG Hewan / Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Pemanfaatan SDG Hewan/ Tanaman	
			Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana perkebunan		Cakupan Luas Lahan Perkebunan dengan prasarana yang sesuai standar	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	
				Berkembangnya prasarana Pasca Panen dan Pengolahan Hasil perkebunan	Jumlah Prasarana Pertanian Yang Dikembangkan	Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian	
				Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terwujudnya peningkatan pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan	Jumlah pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan	Peningkatan pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan	
				Meningkatnya kualitas prasarana perkebunan	Jumlah Prasarana Pertanian Yang Dibangun	Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian	
				Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Embung Pertanian	Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	
				Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Pintu Air	Jumlah Pintu Air yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air	
				Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	
				Terehabilitasi dan terpeliharanya jaringan irigasi usaha tani	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	
			Meningkatnya Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Perkebunan		1. Persentase Penanganan Bencana Perkebunan	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	
					2. Persentase Terbinanya Area dengan Nilai Konservasi Tinggi (ANKT) dalam wilayah berijin		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Meningkatnya Cakupan Luas Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Perkebunan	Luas Pengendalian OPT dan Bencana Perkebunan	Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	
				Terkendalinya Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	
				Tertanganinya Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	
			Meningkatnya kualitas dan kemudahan perizinan Usaha perkebunan		1. Persentase perkebunan besar berijin usaha yang terbina dan terawasi	Program Perizinan Usaha Pertanian	
					2. Persentase STDB yang diterbitkan		
				Meningkatnya ketepatan waktu penerbitan STDB dan Sertifikat PUP	Jumlah STDB dan Sertifikat PUP Yang diterbitkan	Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terbina dan terawasinya penerapan standar dan izin usaha pertanian	Jumlah izin Usaha Pertanian yang dibina dan diawas	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar dan Izin Usaha Pertanian	
			Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Bidang Perkebunan		Persentase Kelembagaan Petani yang Kapasitasnya Meningkat	Program Penyuluhan Pertanian	
				Meningkatnya Cakupan Pembinaan Kelembagaan Bidang Perkebunan	Jumlah Kelembagaan Petani Perkebunan yag dibina	Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	
				Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Kecamatan dan Desa			
				Termanfaatkannya teknologi inovasi pertanian yang didesiminasi	Jumlah diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi, dan inovasi pertanian	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi, dan Inovasi Pertanian	

Rencana program, kegiatan, subkegiatan, indikator kinerja, target dan pendanaan indikatif Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029 secara lengkap dapat dilihat pada Table berikut ini :

Tabel 4.3 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				30.199.757.625 ,00		40.103.853.848 ,25		41.887.812.063 ,38		45.419.761.793 ,10		48.222.467.329 ,06		
3.27.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				19.569.757.625 ,00		29.243.853.848 ,25		28.986.786.352 ,38		28.131.786.352 ,10		28.131.786.352 ,06		
Meningkatnya Akuntabilitas Dan Tatakelola Kinerja Perangkat Daerah yang Efektif dan Efesien (DISBUN)	Nilai Sakip Perangkat Daerah (Nilai)	72,37	74,50	19.569.757.625 ,00	76,00	29.243.853.848 ,25	77,50	28.986.786.352 ,38	79,00	28.131.786.352 ,10	81,50	28.131.786.352 ,06	3.27.0.00.0.00.02.0 000 - Dinas Perkebunan	
3.27.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				250.000.000,00		850.000.000,00		900.000.000,00		900.000.000,00		900.000.000,00		
Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	0	0	250.000.000,00	1	850.000.000,00	1	900.000.000,00	1	900.000.000,00	1	900.000.000,00		
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3	2		3		3		3		3			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	0	0		1		1		1		1			
	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	0	0		1		1		1		1			
3.27.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				150.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3	2	150.000.000,00	3	250.000.000,00	3	250.000.000,00	3	250.000.000,00	3	250.000.000,00		
3.27.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANG AN	
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00			
3.27.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				50.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00			
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1	1	50.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00			
3.27.01.2.01.0008 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				0,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00			
Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	0	0	0,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00			
3.27.01.2.01.0009 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah				0,00		300.000.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00			
Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	0	0	0,00	1	300.000.000,00	1	350.000.000,00	1	350.000.000,00	1	350.000.000,00			
3.27.01.2.01.0010 - Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	0	0	0,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00		
3.27.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				16.372.251.273,00		22.378.120.000,00		22.378.120.000,00		22.378.120.000,00		22.378.120.000,00		
Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	0	0	16.372.251.273,00	1	22.378.120.000,00	1	22.378.120.000,00	1	22.378.120.000,00	1	22.378.120.000,00		
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	12	12		12		12		12					
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	1.719	1.414		2.660		2.660		2.660					
	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	0	0		1		1		1					
3.27.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				16.144.131.273,00		22.100.000.000,00		22.100.000.000,00		22.100.000.000,00		22.100.000.000,00		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	1.719	1.414	16.144.131.273,00	2.660	22.100.000.000,00	2.660	22.100.000.000,00	2.660	22.100.000.000,00	2.660	22.100.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.27.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				0,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	0	0	0,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00		
3.27.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				228.120.000,00		228.120.000,00		228.120.000,00		228.120.000,00		228.120.000,00		
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	12	12	228.120.000,00	12	228.120.000,00	12	228.120.000,00	12	228.120.000,00	12	228.120.000,00		
3.27.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				0,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		
Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	0	0	0,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00		
3.27.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				150.000.000,00		406.660.000,00		431.660.000,00		431.660.000,00		431.660.000,00		
Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	1	150.000.000,00	1	406.660.000,00	1	431.660.000,00	1	431.660.000,00	1	431.660.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	1		1		1							
	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)	0	0		1		1		1		1			
	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	0	0		1		1							
3.27.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				0,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		
Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	0	0	0,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00		
3.27.01.2.03.0002 - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				50.000.000,00		200.000.000,00		225.000.000,00		225.000.000,00		225.000.000,00		
Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	1	50.000.000,00	1	200.000.000,00	1	225.000.000,00	1	225.000.000,00	1	225.000.000,00		
3.27.01.2.03.0003 - Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				0,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Tersedianya Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)	0	0	0,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.27.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				50.000.000,00		81.660.000,00		81.660.000,00		81.660.000,00		81.660.000,00		
Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	1	50.000.000,00	1	81.660.000,00	1	81.660.000,00	1	81.660.000,00	1	81.660.000,00		
3.27.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00		
3.27.01.2.04 - Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah				25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		
Jumlah Dokumen Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen)	1	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00		
3.27.01.2.04.0007 - Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah				25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		
Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen)	1	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00		
3.27.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				210.000.000,00		760.000.000,00		760.000.000,00		760.000.000,00		760.000.000,00		
Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	22	20	210.000.000,00	32	760.000.000,00	32	760.000.000,00	32	760.000.000,00	32	760.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	40	30		40		40		40		40			
	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0	0		380		380		380		380			
3.27.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				0,00		380.000.000,00		380.000.000,00		380.000.000,00		380.000.000,00		
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0	0	0,00	380	380.000.000,00	380	380.000.000,00	380	380.000.000,00	380	380.000.000,00		
3.27.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				150.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	22	20	150.000.000,00	32	300.000.000,00	32	300.000.000,00	32	300.000.000,00	32	300.000.000,00		
3.27.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				60.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00		
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	40	30	60.000.000,00	40	80.000.000,00	40	80.000.000,00	40	80.000.000,00	40	80.000.000,00		
3.27.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				565.000.000,00		1.344.500.000,00		1.349.500.000,00		1.334.500.000,00		1.334.500.000,00		
Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12	565.000.000,00	12	1.344.500.000,00	12	1.349.500.000,00	12	1.334.500.000,00	12	1.334.500.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	0	0		12		12		12		12			
	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	0	0		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	13	17		17		17		17					
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4	4		4		4		4					
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	7	7		7		7		7					
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	30	25		30		30		30					
3.27.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi				40.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	7	7	40.000.000,00	7	30.000.000,00	7	30.000.000,00	7	30.000.000,00	7	30.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.27.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				100.000.000,00		180.000.000,00		180.000.000,00		180.000.000,00		180.000.000,00		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	30	25	100.000.000,00	30	180.000.000,00	30	180.000.000,00	30	180.000.000,00	30	180.000.000,00		
3.27.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				55.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		55.000.000,00		55.000.000,00		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	13	17	55.000.000,00	17	70.000.000,00	17	70.000.000,00	17	55.000.000,00	17	55.000.000,00		
3.27.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				70.000.000,00		75.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4	4	70.000.000,00	4	75.000.000,00	4	80.000.000,00	4	80.000.000,00	4	80.000.000,00		
3.27.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				0,00		54.500.000,00		54.500.000,00		54.500.000,00		54.500.000,00		
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	0	0	0,00	12	54.500.000,00	12	54.500.000,00	12	54.500.000,00	12	54.500.000,00		
3.27.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				250.000.000,00		610.000.000,00		610.000.000,00		610.000.000,00		610.000.000,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12	250.000.000,00	12	610.000.000,00	12	610.000.000,00	12	610.000.000,00	12	610.000.000,00		
3.27.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				50.000.000,00		225.000.000,00		225.000.000,00		225.000.000,00		225.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1	1	50.000.000,00	1	225.000.000,00	1	225.000.000,00	1	225.000.000,00	1	225.000.000,00		
3.27.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				0,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	0	0	0,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00		
3.27.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Barang Milik Daerah yang Diadakan				280.000.000,00		1.747.067.496,00		1.400.000.000,00		550.000.000,00		550.000.000,00		
	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0	0	280.000.000,00	2	1.747.067.496,00	2	1.400.000.000,00	0	550.000.000,00	0	550.000.000,00		
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	21	8		16		18		21		21			
	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	0		7		0		0		0			
3.27.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				0,00		800.000.000,00		900.000.000,00		0,00		0,00		
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0	0	0,00	2	800.000.000,00	2	900.000.000,00	0	0,00	0	0,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.27.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				180.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	1	1	180.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00		
3.27.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				0,00		477.067.496,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	0	0,00	7	477.067.496,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
3.27.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				100.000.000,00		270.000.000,00		300.000.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	21	8	100.000.000,00	16	270.000.000,00	18	300.000.000,00	21	350.000.000,00	21	350.000.000,00		
3.27.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.017.506.352, 00		1.032.506.352, 25		1.042.506.352, 38		1.052.506.352, 10		1.052.506.352, 06		
Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	1.017.506.352, 00	12	1.032.506.352, 25	12	1.042.506.352, 38	12	1.052.506.352, 10	12	1.052.506.352, 06		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12					
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12					
3.27.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				400.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	400.000.000,00	12	400.000.000,00	12	400.000.000,00	12	400.000.000,00	12	400.000.000,00		
3.27.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				95.000.000,00		110.000.000,00		120.000.000,00		130.000.000,00		130.000.000,00		
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	95.000.000,00	12	110.000.000,00	12	120.000.000,00	12	130.000.000,00	12	130.000.000,00		
3.27.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				522.506.352,00		522.506.352,25		522.506.352,38		522.506.352,10		522.506.352,06		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	522.506.352,00	12	522.506.352,25	12	522.506.352,38	12	522.506.352,10	12	522.506.352,06		
3.27.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				700.000.000,00		700.000.000,00		700.000.000,00		700.000.000,00		700.000.000,00		
Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	116	53	700.000.000,00	87	700.000.000,00	87	700.000.000,00	87	700.000.000,00	87	700.000.000,00		
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3	3				3		3		3			
3.27.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				400.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	116	53	400.000.000,00	87	400.000.000,00	87	400.000.000,00	87	400.000.000,00	87	400.000.000,00		
3.27.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3	3	300.000.000,00	3	300.000.000,00	3	300.000.000,00	3	300.000.000,00	3	300.000.000,00		
3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN				4.625.000.000,00		5.180.000.000,00		5.891.025.711,00		9.327.975.441,00		11.830.680.977,00	3.27.0.00.0.00.02.000 - Dinas Perkebunan	
Meningkatnya Produksi Komoditas Perkebunan yang didukung Sarana Berkualitas dan Merata (DISBUN)	Produksi Komoditas Perkebunan (Ton)	3.581.861,51	4.026.651,12	4.625.000.000,00	4.272.514,95	5.180.000.000,00	4.534.450,29	5.891.025.711,00	4.813.552,77	9.327.975.441,00	5.111.011,89	11.830.680.977,00		
3.27.02.2.01 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian				4.500.000.000,00		5.030.000.000,00		5.741.025.711,00		9.177.975.441,00		11.655.680.977,00		
Jumlah Sarana Pendukung Pertanian Yang Digunakan Sesuai Standar	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian (Laporan)	40	22	4.500.000.000,00	4	5.030.000.000,00	5	5.741.025.711,00	5	9.177.975.441,00	5	11.655.680.977,00		
3.27.02.2.01.0002 - Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian				4.500.000.000,00		5.030.000.000,00		5.741.025.711,00		9.177.975.441,00		11.655.680.977,00		
Terlaksananya Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian (Laporan)	40	22	4.500.000.000,00	4	5.030.000.000,00	5	5.741.025.711,00	5	9.177.975.441,00	5	11.655.680.977,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.27.02.2.02 - Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota				125.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		175.000.000,00		
Jumlah Sumber Daya Genetik (SDG) Tanaman Perkebunan yang dimanfaatkan	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman (Dokumen)	1	1	125.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	175.000.000,00		
3.27.02.2.02.0003 - Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman				125.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		175.000.000,00		
Termanfaatkannya SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman (Dokumen)	1	1	125.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	175.000.000,00		
3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN				5.005.000.000,00		4.530.000.000,00		5.760.000.000,00		6.360.000.000,00		6.660.000.000,00	3.27.0.00.0.00.02.000 - Dinas Perkebunan	
Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana perkebunan (DISBUN)	Cakupan Luas Lahan Perkebunan dengan prasarana yang sesuai standar (Ha)	410	640	5.005.000.000,00	800	4.530.000.000,00	970	5.760.000.000,00	1.150	6.360.000.000,00	1.350	6.660.000.000,00		
3.27.03.2.01 - Pengembangan Prasarana Pertanian				100.000.000,00		250.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		800.000.000,00		
Jumlah Prasarana Perkebunan Yang Dikembangkan	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya (Laporan)	0	1	100.000.000,00	0	250.000.000,00	1	500.000.000,00	0	500.000.000,00	1	800.000.000,00		
	Jumlah pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan (Unit)	0	0		1		1		2		2			
3.27.03.2.01.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya				100.000.000,00		0,00		250.000.000,00		0,00		300.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya (Laporan)	0	1	100.000.000,00	0	0,00	1	250.000.000,00	0	0,00	1	300.000.000,00		
3.27.03.2.01.0010 - Peningkatan pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan				0,00		250.000.000,00		250.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		
terwujudkan peningkatan pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan	Jumlah pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan (Unit)	0	0	0,00	1	250.000.000,00	1	250.000.000,00	2	500.000.000,00	2	500.000.000,00		
3.27.03.2.02 - Pembangunan Prasarana Pertanian				4.905.000.000,00		4.280.000.000,00		5.260.000.000,00		5.860.000.000,00		5.860.000.000,00		
Jumlah Prasarana Perkebunan Yang Dibangun	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	1	1	4.905.000.000,00	0	4.280.000.000,00	0	5.260.000.000,00	0	5.860.000.000,00	0	5.860.000.000,00		
	Jumlah Pintu Air yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	21	5		1		1		1		1			
	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi (Unit)	7	8		4		4		10		10			
	Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	2	0		0		0		0		0			
	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	12	9		7		8		8		8			
3.27.03.2.02.0002 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Embung Pertanian	Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	2	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.27.03.2.02.0003 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani				3.555.000.000,00		3.820.000.000,00		4.800.000.000,00		4.800.000.000,00		4.800.000.000,00		
Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	12	9	3.555.000.000,00	7	3.820.000.000,00	8	4.800.000.000,00	8	4.800.000.000,00	8	4.800.000.000,00		
3.27.03.2.02.0006 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air				300.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		
Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Pintu Air	Jumlah Pintu Air yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	21	5	300.000.000,00	1	60.000.000,00	1	60.000.000,00	1	60.000.000,00	1	60.000.000,00		
3.27.03.2.02.0009 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya				250.000.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	1	1	250.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
3.27.03.2.02.0010 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani				800.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		
terehabilitasi dan terpeliharanya jaringan irigasi usaha tani	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi (Unit)	7	8	800.000.000,00	4	400.000.000,00	4	400.000.000,00	10	1.000.000.000,00	10	1.000.000.000,00		
3.27.05 - PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN				400.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		
Meningkatnya Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Perkebunan (DISBUN)	Persentase Penanganan Bencana Perkebunan (%)	55,00	60,00	400.000.000,00	65,00	400.000.000,00	72,50	400.000.000,00	81,25	500.000.000,00	91,25	500.000.000,00	3.27.0.00.0.00.02.0000 - Dinas Perkebunan	
	Persentase Terbinanya Area dengan Nilai Konservasi Tinggi (ANKT) dalam wilayah berijin (%)	64,06	66,27		66,82		67,37		67,92		68,48			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.27.05.2.01 - Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota				400.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		
Luas Pengendalian OPT Dan Bencana Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani (Ha)	23.200	24.000	400.000.000,00	24.200	400.000.000,00	24.400	400.000.000,00	24.600	500.000.000,00	24.800	500.000.000,00		
	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan (Ha)	120	140		150		170		195		225			
	Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (Ha)	100	100		110		120		130		140			
3.27.05.2.01.0001 - Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan				200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		
Terkendalinya Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan (Ha)	120	140	200.000.000,00	150	200.000.000,00	170	200.000.000,00	195	300.000.000,00	225	300.000.000,00		
3.27.05.2.01.0002 - Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan,				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Hortikultura, dan Perkebunan														
Tertanganinya Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani (Ha)	23.200	24.000	100.000.000,00	24.200	100.000.000,00	24.400	100.000.000,00	24.600	100.000.000,00	24.800	100.000.000,00		
3.27.05.2.01.0003 - Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Terlaksananya Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (Ha)	100	100	100.000.000,00	110	100.000.000,00	120	100.000.000,00	130	100.000.000,00	140	100.000.000,00		
3.27.06 - PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN				250.000.000,00		250.000.000,00		300.000.000,00		450.000.000,00		450.000.000,00		
Meningkatnya Kualitas dan Kemudahan Perizinan Usaha Perkebunan (DISBUN)	Persentase perkebunan besar berijin usaha yang terbina dan terawasi (%)	100	100	250.000.000,00	100	250.000.000,00	100	300.000.000,00	100	450.000.000,00	100	450.000.000,00	3.27.0.00.0.00.02.0000 - Dinas Perkebunan	
	Persentase STDB yang diterbitkan (%)	1,43	2,81		3,50		4,54		6,06		7,58			
3.27.06.2.01 - Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota				250.000.000,00		250.000.000,00		300.000.000,00		450.000.000,00		450.000.000,00		
Jumlah STDB dan Sertifikat PUP Yang diterbitkan	Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi (Laporan)	2	2	250.000.000,00	2	250.000.000,00	2	300.000.000,00	2	450.000.000,00	2	450.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.27.06.2.01.0005 - Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian				250.000.000,00		250.000.000,00		300.000.000,00		450.000.000,00		450.000.000,00		
Terbina dan terawasinya penerapan standar dan izin usaha pertanian	Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi (Laporan)	2	2	250.000.000,00	2	250.000.000,00	2	300.000.000,00	2	450.000.000,00	2	450.000.000,00		
3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN				350.000.000,00		500.000.000,00		550.000.000,00		650.000.000,00		650.000.000,00	3.27.0.00.0.00.02.0000 - Dinas Perkebunan	
Meningkatnya kapasitas Kelembagaan Bidang Perkebunan (DISBUN)	Persentase Kelembagaan Petani yang Kapasitasnya Meningkat (%)	4,88	3,92	350.000.000,00	8,91	500.000.000,00	13,89	550.000.000,00	18,88	650.000.000,00	19,96	650.000.000,00		
3.27.07.2.01 - Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian				350.000.000,00		500.000.000,00		550.000.000,00		650.000.000,00		650.000.000,00		
Jumlah Kelembagaan Petani Perkebunan yang dibina	Jumlah diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian (Dokumen)	1	1	350.000.000,00	1	500.000.000,00	1	550.000.000,00	1	650.000.000,00	1	650.000.000,00		
	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)	46	37				47		47		47			
3.27.07.2.01.0002 - Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa				250.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		
Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)	46	37	250.000.000,00	47	300.000.000,00	47	300.000.000,00	47	300.000.000,00	47	300.000.000,00		
3.27.07.2.01.0009 - Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian				100.000.000,00		200.000.000,00		250.000.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00		
Termanfaatkannya teknologi inovasi pertanian yang didesiminasikan oleh penyuluh pertanian	Jumlah diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian (Dokumen)	1	1	100.000.000,00	1	200.000.000,00	1	250.000.000,00	1	350.000.000,00	1	350.000.000,00		

4.4. URAIAN SUBKEGIATAN DALAM RANGKA MENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029. maka Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara terdapat 3 (tiga) Subkegiatan Prioritas yang akan mendukung Program Prioritas tersebut, yang dapat dilihat Tabel di bawah. Selain itu Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian mendukung program prioritas bupati (program dedikasi): Program Petani/Peternak/Nelayan Tangguh.

Tabel 4.4 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN PRIORITAS	SUBKEGIATAN PRIORITAS	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Meningkatnya produksi komoditas perkebunan yang didukung sarana berkualitas dan merata	Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian	
2	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana perkebunan	Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian	Peningkatan pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan	
3	Program Penyuluhan Pertanian	Meningkatnya kapasitas kelembagaan Bidang Perkebunan	Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Pengembangan kapasitas kelembagaan petani di Kecamatan dan Desa	

4.5. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PERANGKAT DAERAH

Dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RENSTRA Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara maka ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU), dalam Tabel Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD sesuai dengan visi dan misi kepala daerah. IKU berfungsi sebagai matrik finansial maupun non-finansial yang digunakan untuk membantu organisasi menentukan dan mengukur kemajuan terhadap sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan penjabaran diatas maka IKU Dinas Perkebunan Bisa dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.5 Indikator Kinerja Utama Dinas Perkebunan

No	Indikator Tujuan / Sasaran	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Ket
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Indikator Tujuan									
1	Persentase Pertumbuhan Nilai Produksi Sub Sektor Perkebunan	Persen	5,54	5,77	5,79	5,91	5,95	5,98	6,01	
	Indikator Sasaran									
2	Persentase Pertumbuhan Produksi Komoditas Perkebunan	Persen	5,97	5,98	6,07	6,11	6,13	6,16	6,18	
3	Rata-Rata Produktivitas Komoditas Perkebunan	Ton/Ha	4,48	4,58	4,65	4,74	4,82	4,89	4,97	

Sumber : Hasil proyeksi, 2025

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029 merupakan upaya Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara untuk melanjutkan berbagai kebijakan pengembangan sub sektor perkebunan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kutai Kartanegara. RENSTRA Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029 memuat tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan, serta implementasi rencana program, kegiatan dan Subkegiatan. Pembangunan sektor perkebunan lima tahun kedepan memiliki sasaran “Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Komoditas Perkebunan” yang akan dicapai dengan sinergi dan kolaborasi dengan berbagai pihak. Peningkatan produksi dan produktivitas perkebunan bukan hanya menghasilkan output ekonomi. namun juga memastikan ketahanan sektor perkebunan jangka panjang yang inklusif dan ramah lingkungan.

Rencana Strategis Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029 disusun untuk memberikan arah yang jelas pada pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsi Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara dalam menjalankan berbagai prioritas pembangunan daerah. Selain itu, dokumen ini juga berfungsi sebagai rambu-rambu strategis yang harus dilaksanakan dan dikendalikan kinerjanya setiap tahun melalui Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah (PD) dan dipertanggungjawabkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Perangkat Daerah (PD).

Sesuai dengan perkembangan lingkungan internal dan eksternal yang terus mengalami perubahan maka Rencana Strategis Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029 tidak bersifat kaku dan senantiasa dinamis menyesuaikan perubahan-perubahan yang terjadi. Dalam rangka peningkatan kapasitas, kerjasama dan loyalitas dalam melaksanakan tugas sesuai dengan wewenang yang diberikan, maka komitmen dari setiap jajaran lingkup Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara sangat diharapkan. Dengan demikian, penting bagi Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara untuk mengedepankan aspek perencanaan beserta fungsi pengendalian dan evaluasinya agar semua program, kegiatan, dan Subkegiatan yang sudah direncanakan dapat berjalan sesuai dengan waktunya.

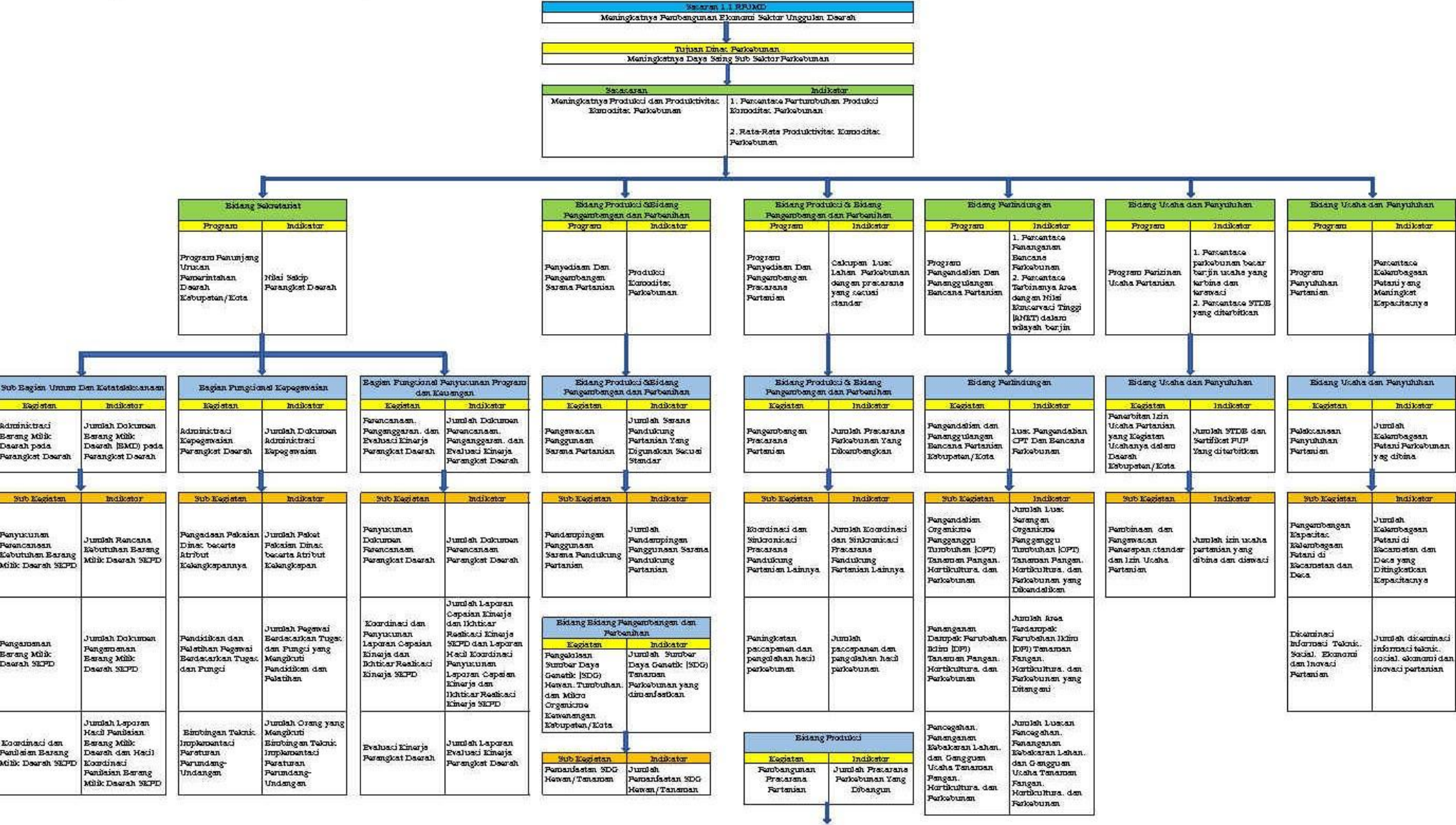
Dalam rangka memastikan perencanaan yang dimuat dalam RENSTRA Dinas Perkebunan Tahun 2025-2029 dapat berjalan dengan efektif dan efisien, maka diperlukan beberapa kaidah pelaksanaan. Kaidah pelaksanaan yang perlu menjadi perhatian adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas Perkebunan bertanggungjawab atas pencapaian kinerja sasaran (*impact*) RENSTRA Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029;
2. Pejabat Eselon III dan Eselon IV di lingkungan Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara bertanggungjawab atas pencapaian kinerja program (*outcome*) dalam Rencana Strategis Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029;
3. Pelaksanaan RENSTRA Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029 dilakukan melalui Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara yang menjadi dasar dalam penyusunan RKD dan DPA Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara;
4. Evaluasi RENSTRA Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029 dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam lima tahun dengan menggunakan Evaluasi Hasil Renja Perangkat Daerah;
5. Evaluasi hasil Renja Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara tiap tahun dilakukan melalui evaluasi hasil pelaksanaan DPA Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara tiap triwulan. Hal tersebut digunakan untuk menyusun LKjiP sekaligus dijadikan sebagai instrumen untuk mengendalikan dan mengevaluasi efektivitas strategi dan kebijakan RENSTRA Dinas Perkebunan dalam mencapai sasaran RENSTRA Dinas Perkebunan; dan
6. Dinas Perkebunan menyusun LKjiP yang sekaligus dijadikan sebagai instrumen untuk mengendalikan dan mengevaluasi efektivitas strategi dan kebijakan RENSTRA Dinas Perkebunan dalam mencapai sasaran RENSTRA Dinas Perkebunan.

Tenggarong, 12 Januari 2026



Lampiran 1. :
Pohon Kinerja Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029



Rekonsiliasi dan Penyukunan Laporan Erang Mlik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyukunan Laporan Erang Mlik Daerah pada SKPD
Penstaukahan Erang Mlik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penstaukahan Erang Mlik Daerah pada SKPD

Registan	Indikator
Administrasi	Jumlah Layanan
Uraian Perangkat	Administrasi
Daerah	Uraian Perangkat
	Daerah

Sub Kegiatan	Indikator
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Didisain
Penyediaan Perawatan dan Pengkangan Kantor	Jumlah Paket Perawatan dan Pengkangan Kantor yang Didisain
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Didisain
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Didisain
Penyediaan Bahan Baku dan Peraturan Perundang-und	Jumlah Dokumen Bahan Baku dan Peraturan Perundang-und
Pengelolaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemantauan Berbasis Elektronik	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemantauan Berbasis Elektronik

Kerapatan	Indikator
Pengadaan Barang Milik Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang Didanakan
Peruntukan Anggaran Pemerintah Daerah	

Sub Kegiatan	Indikator
Pengadaan Kandang	Jumlah Unit Kandang
Penarikan Dinas atau Kandang Dinas Jabatan	Penarikan Dinas atau Kandang Dinas Jabatan yang
Pengadaan Kandang Dinas Operasional atau Irian	Jumlah Unit Kandang Dinas Operasional atau Irian yang disediakan
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan
Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin lainnya yang disediakan

Penyelenggaraan Waditra Pendaftaran Statistik Sakral Daerah	Jumlah Dokumen Hati
Penyelenggaraan Waditra Pendaftaran Statistik Sakral Daerah	Penyelenggaraan Waditra Pendaftaran Statistik Sakral Daerah
Pencatatan Pengumpulan Data Statistik Sakral Daerah	Jumlah Data Statistik Sakral Daerah yang Telah Dipaparkan dan Diperiksa Lajur Pemerintah Daerah
Pencatatan dan Pengumpulan Data Statistik Sakral Daerah	Jumlah Berita Akas Hedi Parum Berita Berakas Hedi Edding Urutan yang Dampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Pemerintah Daerah

Kegiatan	Indikator
Administrasi	Jumlah Laporan
Keuangan	Administrasi
Perangkat Daerah	Keuangan
	Perangkat Daerah

Sub Kegiatan	Indikator
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menenerima Gaji dan Tunjangan ASN
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangm Akhira Tahun SIKPD	Keuangan Laporan Keuangan Akhira Tahun SIKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Keuangan Laporan Keuangan Akhira Tahun SIKPD dan Laporan Koordinasi
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangm Bulanan/ Semesteran/ Tahunan	Keuangan Bulanan/ Trivulan/ Semesteran SIKPD dan Laporan Koordinasi Keuangan Bulanan/ Trivulan/ Semesteran/ Tahunan SIKPD dan Laporan Koordinasi
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Realisasi Anggaran

Kegiatan	Indikator
Administrasi	Jumlah Dokumen Administrasi
Pendapatan Daerah	Pendapatan Daerah
Kewenangan	Kewenangan
Perangkat Daerah	Perangkat Daerah

Sub Kegiatan	Indikator
Pelaporan	Jumlah Laporan
Pengalokasian	Pengalokasian
Retribusi Daerah	Retribusi Daerah

Sub Kegiatan	Indikator
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Dinaahutabatisasi dan Dipelihara
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Dinaahutabatisasi dan Dipelihara
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air	Jumlah Pintu Air yang Dibangun, Dinaahutabatisasi dan Dipelihara
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Partenan Lainnya	Jumlah Prasarana Partenan Lainnya yang Dibangun, Dinaahutabatisasi dan Dipelihara
Pembangunan Jaringan Irigasi Mekanis	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang dinaahutabatisasi





PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
KEPUTUSAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 286/SK-BUP/HK/2025
TENTANG
TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS DINAS PERKEBUNAN
TAHUN 2025 SAMPAI DENGAN 2029

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang:
- a.

bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Strategis Dinas Perkebunan Tahun 2025 sampai dengan 2029, serta untuk lebih efektif proses penyusunan maka perlu membentuk Tim Penyusun agar dalam proses pelaksanaan lebih terarah, terukur dan tepat waktu sesuai dengan agenda serta jadwal yang ditetapkan;
- b.

bahwa telah diusulkan nama-nama personil yang oleh Perangkat Daerah pengusul mempunyai kemampuan untuk ditetapkan menjadi anggota Tim penyusun sebagaimana disebutkan dalam draft yang dilampirkan dengan Telaahan Staf yang disampaikan;
- c.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Perkebunan Tahun 2025 sampai dengan 2029;
- Mengingat:
1.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9) sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II

Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 17 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 Nomor 181, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 Nomor 91);

- 7. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 45 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 Nomor 45);
- 8. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 Nomor 64);
- 9. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 19 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 Nomor 67);
- 10. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 25 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 Nomor 73);

Memperhatikan: Telaahan Staf Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor: B-5346/DISBUN/SET-I/500.8.5.4/08/2025 tanggal 12 Agustus 2025, Perihal Permohonan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Kutai Kartanegara tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU: Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Perkebunan Tahun 2025 sampai dengan 2029, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA: Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Penanggung jawab:
 1. bertanggungjawab terhadap aktifitas dan pekerjaan yang dilaksanakan oleh anggota Tim Penyusun;
 2. memberikan arahan dan petunjuk kepada Tim dalam penyusunan Renstra; dan
 3. bertanggung jawab sesuai tugas yang telah ditetapkan;
- b. Ketua:
 1. mengoordinasikan pekerjaan yang dilaksanakan oleh anggota Tim Penyusun;
 2. membantu Penanggung Jawab dalam memberikan arahan dan petunjuk kepada anggota Tim;
 3. mengoreksi dan menyampaikan laporan hasil pekerjaan Tim Penyusun kepada Penanggung Jawab; dan
 4. bertanggung jawab sesuai tugas yang telah ditetapkan;
- c. Anggota:
 1. mereviu hasil evaluasi pelaksanaan Renstra Dinas tahun lalu;
 2. melakukan analisis terhadap pencapaian dan perencanaan kinerja program dan kegiatan Renstra Tahun 2025-2029;
 3. melakukan telaah terhadap isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi;
 4. merumuskan tujuan, sasaran dan program kegiatan Dinas;
 5. merumuskan kegiatan prioritas Renstra Dinas;
 6. menampung hasil telaahan koreksi dan masukan atas Renstra masing-masing bidang;
 7. melaksanakan penyempurnaan Renstra Dinas hasil telaahan, koreksi dan masukan masing-masing bidang; dan
 8. bertanggung jawab sesuai tugas yang telah ditetapkan.

- KETIGA: Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dan dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman kepada peraturan perundang-undangan;
- KEEMPAT: Honorarium diberikan kepada personil Tim yang tugas dan fungsi Perangkat Daerahnya tidak meliputi kegiatan sebagaimana dimaksud dalam keputusan ini, dan memperhatikan batasan jumlah keanggotaan Tim sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional, serta kriteria lainnya yang berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- KELIMA: Pelaksanaan diktum KEEMPAT tersebut diatas menjadi tanggungjawab pengelola anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
- KEENAM: Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- KETUJUH: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 22 Oktober 2025
BUPATI KUTAI KARTANEGARA

ttd

AULIA RAHMAN BASRI

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
2. Assisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
3. Inspektur Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
4. Kepala BAPPEDA Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
5. Kepala BPKAD Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
6. Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum


PURNOMO, S.H.
NIP 197806052002121002

LAMPIRAN: KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 286/SK-BUP/HK/2025 TANGGAL 22 OKTBER 2025
TENTANG TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS DINAS
PERKEBUNAN TAHUN 2025 SAMPAI DENGAN 2029.

SUSUNAN PERSONALIA

- I. Penanggung Jawab: Kepala Dinas Perkebunan
- II. Ketua: Sekretaris Dinas Perkebunan
- III. Anggota:
 - 1. Kepala Bidang Produksi, Dinas Perkebunan
 - 2. Kepala Bidang Pengembangan dan Perbenihan, Dinas Perkebunan
 - 3. Kepala Bidang Perlindungan, Dinas Perkebunan
 - 4. Kepala Bidang Usaha dan Penyuluhan, Dinas Perkebunan
 - 5. Kepala Bidang Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 - 6. Kepala Sub Bagian Umum dan Ketatalaksanaan
 - 7. Nor Aida, SP.MP
NIP 197101021994022001
(Pengawas Alat dan Mesin Pertanian Ahli Muda, Dinas Perkebunan)
 - 8. Sukatmi, SP
NIP 197212162007012008
(Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi, Dinas Perkebunan)

BUPATI KUTAI KARTANEGARA
ttd
AULIA RAHMAN BASRI